

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEBARAN INFORMASI  
PUBLIK MELALUI MEDIA PENYIARAN  
(Studi Kasus Pada Karyawan TVRI Pusat)**

**Tesis  
Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan dalam Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Studi  
Magister Administrasi Publik (MAP)**

**Nama : ADITIA PARULIAN M.**

**NIM : 2008 – 02 – 038**



**PROGRAM PASCASARJANA (S2)**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**JAKARTA**

**2013**

## LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN TESIS



Nama Mahasiswa : **ADITIA PARULIAN M**  
NIM : 2008-02-038  
Program Studi : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah dinyatakan lulus ujian Tesis pada tanggal 21 September 2013 dihadapan Pembimbing dan Penguji di bawah ini.

Pembimbing,

**Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP.**

Tim Penguji :

KETUA : **Ir. Alirahman, MSc., Ph.D**   
ANGGOTA : 1. **Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP**   
2. **Ir. Yahya Rachmana Hidayat, Ph.D**   
3. **Leroy Samy Uguy, Ph.D**   
4. **Dr. Deddy Bratakusumah, MURP, MSc**

Jakarta, 21 September 2013

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (S-2)**

Direktur,

**Ir. Alirahman, MSc., Ph.D.**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Esa Unggul maupun di Perguruan Tinggi lain. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis menjadi acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Universitas Esa Unggul.

Jakarta, 24 September 2013

  
MAKESAM  
TEMPIL  
KEMENTERIAN KEHUTANAN  
ID475ARF610930946  
ENAM RIBU-RUPIAH  
6000 DJP  
Aditia Parulian Manurung

## **PRAKATA**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan cintanya yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran (Studi Kasus Pada Karyawan TVRI Pusat) ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memenuhi syarat kelulusan serta untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Universitas Esa Unggul.

Dalam proses penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, berbagai saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki segala ketidaksempurnaan itu.

Selama proses penulisan, penulis telah menerima bimbingan, nasehat dan semangat dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. Alirahman, M.Sc., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta. Yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi.
2. Dr. Ir. Tatag Wiranto, MURP, selaku dosen pembimbing dan Ketua Program Magister Adminitrasi Publik Universitas Esa Unggul. Terima kasih atas arahan, bimbingan serta penjelasan dan kesabaran yang diberikan kepada penulis untuk penyelesaian Tesis ini.

3. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma AP, M.BA selaku Rektor Universitas Esa Unggul Jakarta.
4. Tim Dosen serta Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta.
5. Orang tua tercinta, mama khususnya Opung Zeges juga almarhum papa, Uda Freddy, Tante Lilis, abang-abangku, kakak-kakakku, adik-adikku, keponakanku Rebecka Zeges dan Adara Alvina Zeges terimakasih atas segala dukungan, cinta, moril, doa, materil dan segenap kepercayaan yang diberikan kepada penulis, juga terimakasih kepada bapak Alex Kumara yang telah banyak memberi masukan, motivasi serta dukungan dalam penelitian ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya di bidang ilmu administrasi publik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di masa mendatang.

Jakarta, 24 September 2013

Aditia Parulian M.

## ABSTRAK

**Aditia Parulian M.**, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran (Studi Kasus Pada Karyawan TVRI Pusat).

Stasiun Televisi TVRI adalah stasiun televisi nasional yang didirikan pada tahun 24 Agustus 1962 di Jakarta yang terus berkembang seiring dengan perkembangan bisnis penyiaran yang terjadi pada saat ini.

Penelitian ini akan mengupas secara mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran di lihat dari beberapa variabel, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran.

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat menjelaskan variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F-test.

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,725 (atau sebesar 72,5%) mencerminkan variasi perubahan pada variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran dapat ditentukan oleh semua variabel secara simultan sebesar 72,5%, dan sisanya yaitu sebesar 27,5% merupakan determinasi dari dimensi lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari komunikasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran sebesar 0,091, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,023, terdapat pengaruh yang signifikan dari sumber daya terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran sebesar 0,130, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,003, terdapat pengaruh yang signifikan dari disposisi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran sebesar 0,039, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,018, dan terdapat pengaruh yang signifikan dari struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran sebesar 0,063, dimana nilai p-value (sig) bernilai 0,001.

Dari hasil analisa regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, karena itu disarankan agar sumber daya manusia memiliki peran yang menentukan dalam keberhasilan implementasi, strategi penyebaran informasi publik melalui media penyiaran harus mempertimbangkan dari segi sasaran atau

penerima informasi. Disamping itu pula perlu ditingkatkan dari segi koordinasi antara pemerintah sebagai regulator dan TVRI sebagai implementator.

**Kata Kunci:** Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi dan Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran.

## **ABSTRACT**

***Aditia Parulian M., Factors Affecting Implementation of Public Information Dissemination Through Media Broadcasting (Case Study On Employee TVRI ).***

*Television is the national television station TVRI which was established in August 24, 1962 in Jakarta that continues to grow along with the development of the broadcasting business is happening at the moment.*

*This study explores in depth the factors that influence the implementation of policy dissemination of public information through broadcast media in view of several variables, namely Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure and Public Information Dissemination Policy Implementation Through Broadcast Media.*

*Analysis used in this study is a multiple linear regression analysis to measure how much the communication variables, resources, disposition and bureaucratic structures can explain the dependent variable. Hypothesis testing is done by t-test to test the effect of independent variables on the dependent variable partially. While to examine the independent variables simultaneously used the F test .*

*The coefficient of determination obtained is equal to 0.725 (or by 72.5 %) reflects the change in the variation of the variable policy implementation of public information dissemination through broadcast media, that the implementation of the policy of public information dissemination through broadcast media can be determined by all variables simultaneously at 72.5 %, and the remaining 27.5 % is the determination of the other dimensions that are not included in this study. The results also show that there is a significant effect of communication on policy implementation through the public dissemination of 0,091 broadcast media, where the p-value (sig) value of 0.023, a significant influence of resources towards the implementation of the policy of public information dissemination through broadcast media amounted to 0.130, where the p-value (sig) worth 0,003, a significant influence on the disposition of policy implementation through the public dissemination of 0,039 broadcast media, where the p-value (sig) worth 0,018, and there is significant influence of the structure bureaucracy of policy implementation through the public dissemination of 0.063 broadcasting media, where the value p - value (sig) worth 0,001.*

*From the results of multiple regression analysis it can be concluded that the resource variable is the variable most dominant influence on policy implementation of public information dissemination through broadcast media, because it is suggested that human and financial resources has a decisive role in the successful implementation of the policy of public information dissemination through broadcast media , public information dissemination strategies through broadcast media must be considered in terms of the target or recipient*



*information. Besides, it also needs to be improved in terms of coordination between government as regulator and as an implementer TVRI.*

**Keywords:** *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure and Public Information Dissemination Policy Implementation Through Broadcast Media.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Lembar Pernyataan .....	ii
Prakata .....	iii
Abstrak .....	iv
<i>Abstract</i> .....	v
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xv
Daftar Lampiran .....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	10
1.3. Pembatasan Masalah .....	10
1.4. Perumusan Masalah .....	11
1.5. Tujuan Penelitian .....	12
1.6. Manfaat Penelitian .....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kajian Literatur .....	14
2.1.1. Informasi Publik .....	14
2.1.2. Komunikasi Massa .....	19
2.1.3. Kebijakan Publik .....	22

2.1.4. Implementasi Kebijakan Publik .....	31
2.1.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	37
2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	42
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Kerangka Penelitian .....	45
3.2. Hipotesis Penelitian .....	51
3.3. Desain Penelitian .....	51
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	53
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel .....	56
3.5.1. Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.5.2. Populasi .....	56
3.5.3. Sampel .....	57
3.5.4. Teknik Penarikan Sampel .....	58
3.6. Uji Instrumen .....	58
3.6.1. Uji Validitas .....	58
3.6.2. Uji Reliabilitas .....	59
3.7. Metode Analisis .....	60
3.7.1. Uji Asumsi Klasik .....	60
3.7.2. Uji Hipotesis .....	62
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian .....	65
4.2. Pembahasan .....	70

4.2.1.	Karakteristik Responden .....	70
4.2.1.1.	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	70
4.2.1.2.	Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	71
4.2.1.3.	Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan .....	72
4.2.2.	Hasil Uji Kualitas Data .....	73
4.2.2.1.	Hasil Uji Validitas .....	73
4.2.2.2.	Hasil Uji Reliabilitas .....	75
4.2.2.3.	Hasil Uji Distribusi Frekuensi Pertanyaan Responden .....	76
4.2.3.	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	96
4.2.3.1.	Hasil Uji Multikolinearitas .....	96
4.2.3.2.	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	97
4.2.3.3.	Hasil Uji Normalitas .....	100
4.2.4.	Hasil Uji Hipotesis .....	102
4.2.4.1.	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	102
4.2.4.2.	Hasil Uji t .....	103
4.2.4.3.	Hasil Uji F .....	106
4.3.	Pembahasan Hasil Penelitian .....	107

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan .....	113
5.2. Saran .....	114
DAFTAR PUSTAKA .....	116

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan	Halaman
2.1.	Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	42
3.1.	Operasional Variabel .....	53
4.1.	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	71
4.2.	Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	72
4.3.	Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan .....	73
4.4.	Hasil Uji Validitas .....	74
4.5.	Hasil Uji Reliabilitas .....	75
4.6.	Pertanyaan Ke-1 Variabel Komunikasi ( $X_1$ ) .....	76
4.7.	Pertanyaan Ke-2 Variabel Komunikasi ( $X_1$ ) .....	77
4.8.	Pertanyaan Ke-3 Variabel Komunikasi ( $X_1$ ) .....	78
4.9.	Pertanyaan Ke-4 Variabel Komunikasi ( $X_1$ ) .....	79
4.10.	Pertanyaan Ke-5 Variabel Komunikasi ( $X_1$ ) .....	80
4.11.	Pertanyaan Ke-6 Variabel Komunikasi ( $X_1$ ) .....	81
4.12.	Pertanyaan Ke-1 Variabel Sumber Daya ( $X_2$ ) .....	82
4.13.	Pertanyaan Ke-2 Variabel Sumber Daya ( $X_2$ ) .....	82
4.14.	Pertanyaan Ke-3 Variabel Sumber Daya ( $X_2$ ) .....	83
4.15.	Pertanyaan Ke-4 Variabel Sumber Daya ( $X_2$ ) .....	84
4.16.	Pertanyaan Ke-1 Variabel Disposisi ( $X_3$ ) .....	85
4.17.	Pertanyaan Ke-2 Variabel Disposisi ( $X_3$ ) .....	86
4.18.	Pertanyaan Ke-3 Variabel Disposisi ( $X_3$ ) .....	86
4.19.	Pertanyaan Ke-4 Variabel Disposisi ( $X_3$ ) .....	87

4.20.	Pertanyaan Ke-5 Variabel Disposisi ( $X_3$ ) .....	88
4.21.	Pertanyaan Ke-6 Variabel Disposisi ( $X_3$ ) .....	89
4.22.	Pertanyaan Ke-1 Variabel Struktur Birokrasi ( $X_4$ ) .....	89
4.23.	Pertanyaan Ke-2 Variabel Struktur Birokrasi ( $X_4$ ) .....	90
4.24.	Pertanyaan Ke-3 Variabel Struktur Birokrasi ( $X_4$ ) .....	91
4.25.	Pertanyaan Ke-4 Variabel Struktur Birokrasi ( $X_4$ ) .....	92
4.26.	Pertanyaan Ke-1 Variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran (Y) .....	93
4.27.	Pertanyaan Ke-2 Variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran (Y) .....	94
4.28.	Pertanyaan Ke-3 Variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran (Y) .....	94
4.29.	Pertanyaan Ke-4 Variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran (Y) .....	95
4.30.	Pertanyaan Ke-5 Variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran (Y) .....	96
4.31.	Hasil Uji Multikolinearitas .....	97
4.32.	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	101
4.33.	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	102
4.34.	Hasil Uji t .....	103
4.35.	Hasil Uji F .....	107

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan	Halaman
3.1.	Kerangka Pemikiran .....	46
4.1.	<i>Scatterplot</i> .....	99
4.2.	Normalitas Data .....	100



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Keterangan	Halaman
1	Kuesioner Penelitian .....	119
2	Jawaban Karakteristik Responden .....	125
3	Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Komunikasi ( $X_1$ ) .....	128
4	Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Sumber Daya ( $X_2$ ) .....	132
5	Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Disposisi ( $X_3$ ) .....	136
6	Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Struktur Birokrasi ( $X_4$ ) .....	140
7	Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Implementasi Kebijakan Penyalpaian Informasi Melalui Media Penyalpaian (Y) ..	144
8	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden .....	148
9	Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel Komunikasi ( $X_1$ ) .....	149
10	Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel Sumber Daya ( $X_2$ ) .....	151
11	Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel Disposisi ( $X_3$ ) .....	153
12	Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel Struktur Birokrasi ( $X_4$ ) .....	155
13	Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan Penyalpaian Informasi Melalui Media Penyalpaian (Y) .....	157
14	Regresi Linear Berganda .....	159
15	Tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi .....	162

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah kebijakan dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan publik. Namun, proses pembuatan kebijakan (formulasi hingga implementasi) yang kurang sempurna dan efektif seringkali menjadi penyebab sebuah kebijakan tidak berjalan atau bahkan tidak menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Proses pembuatan kebijakan menjadi penting karena menentukan tepat atau tidaknya kebijakan dibuat. Para ahli sepakat bahwa pemahaman mengenai proses kebijakan (*policy process*) merupakan kunci dari sebuah kebijakan yang berhasil atau setidaknya memiliki tingkat keberhasilan yang terukur dalam menjawab persoalan. Proses kebijakan (*policy process*) atau beberapa ahli juga menyebutnya siklus kebijakan (*policy cycles*) dapat merujuk pada model yang dikembangkan oleh Dye (2002:32) yakni (1) identifikasi masalah, (2) penetapan agenda, (3) perumusan kebijakan, (4) legitimasi kebijakan, (5) implementasi kebijakan, (6) evaluasi kebijakan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat undang-undang yang berlaku nasional atau peraturan daerah yang berlaku lokal. Undang-undang lahir dari sebuah proses perumusan dalam sistem legislasi nasional. Namun, esensi dari lahirnya sebuah undang-

---

<sup>1</sup> Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Tenth Edition Prentice-Hall, hal. 32.

undang atau Perda adalah adanya kebutuhan untuk mengatur persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Kewenangan membuat pengaturan ini dituangkan dalam bentuk undang-undang yang tidak lain adalah kebijakan (*policy*).

Riyanto (2010:12) mengatakan setidaknya ada 3 alasan mengapa harus adanya pengaturan dalam sektor penyiaran dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran 2002) ini. Pertama, tuntutan demokratisasi penyiaran dan/atau dijaminnya kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran di Indonesia. Kedua, dinamika *history* yang spesifik yaitu menempatkan sistem penyiaran sebelumnya pada konfigurasi khas pelayan kekuasaan represif yang tunduk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang muaranya menjadi instrument atau corong pemerintah. Ketiga, bentuk respon terhadap liberalisasi ekonomi yang telah merubah struktur pasar dan pertumbuhan pesat industri media penyiaran di Indonesia.<sup>2</sup>

Media penyiaran berperan sangat signifikan didalam penyampaian informasi ke khalayak ramai. Informasi merupakan sebuah berita yang mempunyai nilai dan layak untuk dipublikasikan. Semakin berkembangnya teknologi, media penyiaran semakin banyak kita jumpai dan nikmati. Teknologi menjadi sumber perkembangan dan kemajuan bagi media penyiaran. Oleh karena itu, saat ini banyak media penyiaran yang lahir dan berkembang di

---

<sup>2</sup> Riyanto, Mochamad. 2010. *Latar Belakang dan Arah Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 12.

tengah masyarakat. Saat ini media penyiaran yang familiar ditelinga kita adalah media elektronik, seperti televisi dan radio. Media tersebut tentunya sangat berperan dalam publikasi informasi, baik oleh institusi pemerintah yang merupakan pusat segala informasi menyangkut kebijakan yang dibutuhkan oleh rakyat, maupun lembaga lain yang membutuhkan peran media dalam rangka menyampaikan informasi penting agar dapat dikonsumsi oleh publik.

Informasi publik dapat dimaknai informasi tentang kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap masyarakat yang harus diketahui dan dipahami secara akurat oleh masyarakat. Selain itu juga dapat diartikan informasi yang bersifat mendesak atas konteks tertentu sebagai bentuk penjelasan atas isu yang berkembang di masyarakat.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki, dihimpun, atau dikuasai oleh suatu badan publik, sehubungan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dijalankannya dan melekat pada badan publik tersebut, serta mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Kondisi dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, bukan saja terhadap media yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika, tetapi juga terhadap media konvensional. Kesenjangan informasi terjadi antara masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu tingkat kehidupan ekonominya, antara

masyarakat yang berpendidikan dengan yang kurang berpendidikan, dan antara masyarakat yang tinggal di perkotaan dengan yang ada di pedesaan.

Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah, tidak semua pemerintah daerah menganggap penting adanya sebuah lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang khusus mengelola penyebaran informasi dan umpan balik (*feedback*) masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan negara serta pelaksanaannya kurang dapat diserap secara optimal oleh pemerintah. Di era reformasi saat ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui khususnya informasi tentang kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Informasi mengenai kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Informasi tersebut menjadi semakin penting, karena dalam menentukan kebijakan publik tersebut harus dapat menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada masyarakat guna mendapat umpan balik dari masyarakat melalui kegiatan penyebaran.

Kendala lain yang dihadapi dalam penyebaran informasi dari segi media, baik media cetak maupun media penyiaran. Media memiliki *setting* sendiri, sehingga ruang (*media online*) dan waktu atau *duration* (di media penyiaran) yang disediakan untuk informasi publik tentang kebijakan pemerintah dan Negara terbatas, kurang lengkap, akurat dan seimbang.

Karena itu kondisi masa depan yang diharapkan adalah terselenggaranya pelayanan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara cepat (relevan dengan masalah yang sedang dihadapi pemerintah), akurat (dapat dipercaya), mudah (tidak melalui prosedur yang rumit) dan merata (terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat).

Fungsi pelayanan informasi publik sebenarnya telah diperankan oleh media massa, lembaga swadaya atau lembaga media komunitas. Namun peran pemerintah sangat diperlukan dalam proses komunikasi penyebaran informasi publik, khususnya informasi tentang kebijakan dan program pemerintah yang harus diketahui dan dipahami masyarakat luas. Fasilitasi memang menjadi kewajiban pemerintah dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik.

Transparansi dalam menjalankan pemerintahan merupakan fondasi bagi upaya mewujudkan membangun tata pemerintahan yang baik. Hak atas informasi jelas merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak jaminan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Partisipasi atau penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan.

Partisipasi pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa ada jaminan informasi publik.

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Pemerintahan yang terbuka dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pejabat publik. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan anggaran, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel.

Secara nasional, pemerintah terus memegang komitmen dalam fasilitasi serta pengembangan layanan informasi publik sesuai dengan amanat Pasal 28 F UUD 1945. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik.

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan,

yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun birokrasi pemerintah.

Menurut Dwidjowidjoto (2008:119 dan 155) implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam proses kebijakan karena implementasi kebijakan sebenarnya bukan hanya sekedar menyangkut mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat karena masalah yang kadang tidak dijumpai dalam perumusan kebijakan muncul di lapangan. Selain itu, implementasi kebijakan menjadi dasar bagi evaluasi kebijakan sehingga dapat diketahui kinerja suatu kebijakan.<sup>3</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat akan tergantung pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Sedangkan kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah.

---

<sup>3</sup> Dwidjowidjoto, R.N. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elek Media Komputindo, hal. 119 dan 155.



Salah satu kebijakan Badan Informasi Publik dalam penyebaran informasi adalah melakukan penguatan koordinasi lembaga-lembaga pelayanan informasi publik baik dipusat maupun daerah untuk mengembangkan sinergi pelayanan yang ada. Sehingga dengan adanya sinergi maka setiap ada permasalahan atau kebutuhan penyebaran informasi akan bisa dilakukan secara proaktif dan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Menurut Wahab (2004:63) terdapat tiga pihak yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan publik, yaitu pembuat kebijakan, pejabat/aparat pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yaitu kepada siapa kebijakan tersebut ditujukan.<sup>4</sup>

Fasilitasi pelancaran arus informasi antar lembaga ditujukan untuk mendorong penyebaran dan pemerataan informasi agar sampai kepada sasaran khalayak. Salah satu faktor pendukung bagi terciptanya pelancaran arus informasi ini adalah terwujudnya kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi serta adanya jaminan terhadap akses informasi publik.

Penyampaian dan penyebaran informasi dalam rangka memasarkan kebijakan dan program pemerintah bukan hal yang mudah, apalagi kepada masyarakat yang relatif beragam begitu banyak faktor yang mempengaruhi proses penyebaran dan pengelolaan informasi publik dapat berjalan efektif dan mudah diterima atau dipahami masyarakat. Dalam proses penyebaran informasi, seluruh media akan dimanfaatkan secara konvergen dan

---

<sup>4</sup> Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 63.

maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari berbagai aspek (tingkat penyebaran, pemerataan, pemahaman, dan kemudahan akses) bagi sasaran khalayak.

Penyebaran informasi, data dan sumber pengetahuan yang dimiliki pemerintah (kecuali yang bersifat rahasia Negara) kepada seluruh komponen masyarakat baik individu maupun kelompok akan mendorong setiap komponen tersebut untuk menggunakannya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan kondisi yang ada sekarang ini, terkadang masih terasa sangat sulit untuk memperoleh suatu informasi, data, maupun sumber pengetahuan yang dimiliki pemerintah yang sebetulnya dapat bermanfaat sekali bagi masyarakat.

Di samping itu, masalah lain yang mungkin dihadapi di Negara kita adalah belum adanya format maupun standar-standar yang mengatur tentang kemasan atau isi dari sebuah informasi itu sendiri sehingga memudahkan untuk diakses dan dimengerti oleh penggunanya. Mengamati fenomena di atas maka masalah penyebaran informasi publik khususnya kebijakan dan program pemerintah menarik dan layak untuk diteliti. Hal ini yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa kebijakan publik dalam penelitian ini adalah kebijakan dalam penyebaran informasi publik harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan

penyebaran informasi publik melalui media penyiaran televisi seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang penelitian, dapat diketahui beberapa temuan yang perlu ditemukan solusi untuk mengatasinya. Berikut dikumpulkan masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi yang pada gilirannya akan diteliti sesuai dengan batasan kemampuan peneliti, yaitu:

1. Belum adanya standar pelayanan informasi yang menjadi acuan pemerintah dalam pemenuhan hak untuk memperoleh informasi masyarakat.
2. Pemerintah belum siap untuk mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Masih kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat dalam hal kebijakan-kebijakan atas apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran yang dirasakan kurang efektif.

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Pembatasan ruang lingkup penelitian ditetapkan agar dalam penelitian yang akan dilaksanakan terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan penelitian nanti tidak menyimpang dari sasarannya. Menyadari akan kemungkinan tidak fokusnya

penelitian sebagai akibat dari melebarnya pembahasan masalah, maka batasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan kepada pengelola stasiun televisi TVRI sebagai responden yang telah diberikan sosialisasi atas penyebaran informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui media penyiaran tersebut.
2. Penelitian dibatasi dalam ruang lingkup pendapat responden tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah komunikasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran?
2. Apakah sumber daya berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran?
3. Apakah disposisi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran?
4. Apakah struktur birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran?

5. Apakah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Sesuai rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui standar pelayanan mendapatkan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada karyawan TVRI Pusat dalam hal pemenuhan hak untuk memperoleh informasi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan dalam menerapkan dan menggunakan konsep-konsep ilmu pengetahuan khususnya di bidang kebijakan publik. Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun studi perbandingan di bidang implementasi kebijakan publik dalam penyebaran informasi publik.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi di daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, dan dapat membantu instansi terkait dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyebaran informasi, serta dapat membantu para *stakeholders* dalam mengembangkan strategi penyebaran informasi yang lebih komunikatif dan efektif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Literatur**

Kajian teori dibutuhkan untuk mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang telah dipaparkan di Bab I, serta untuk mengetahui indikator-indikator apa saja yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori yang kemudian diselaraskan atau disesuaikan dengan masalah yang muncul. Berikut ini adalah paparan tentang konsep-konsep teori yang digunakan oleh peneliti, sebagai berikut:

##### **2.1.1. Informasi Publik**

Informasi layanan pemerintah pada saat sekarang ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan serta mempunyai peranan yang penting dalam bidang politik, ekonomi dan sosial bagi setiap negara, tidak hanya Indonesia. Apalagi dalam era reformasi yang sekarang melanda dunia, kebutuhan akan informasi terasa sangat kuat dan menuntut kemudahan-kemudahan serta kualitas dari informasi yang semakin meningkat. Berbagai media digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat, mudah, akurat, dan terpercaya. Informasi sudah merupakan kebutuhan pokok yang mutlak harus dipenuhi untuk dapat hidup dan bersaing dengan kondisi sekarang. Bagi sebuah negara tentunya informasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di negara tersebut.

Penyebaran informasi, data dan sumber pengetahuan yang dimiliki pemerintah (kecuali yang bersifat rahasi Negara) kepada seluruh komponen masyarakat baik individu maupun kelompok akan mendorong setiap komponen tersebut untuk menggunakannya secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhannya.

Fisher (2007:74) memberikan 3 (tiga) konsep informasi sebagai berikut:

1. Informasi menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama proses komunikasi. Informasi dikonseptualisasikan sebagai kuantitas fisik yang dapat dipindahkan dari satu titik ke titik yang lain, individu satu kepada individu yang lain, atau medium yang satu ke medium yang lainnya. Semakin banyak memperoleh fakta atau data, secara kuantitas seseorang juga memiliki banyak informasi.
2. Informasi menunjukkan makna data. Informasi merupakan arti, maksud atau makna yang terkandung dalam data. Peranan seseorang sangat dominan di dalam memberikan makna data. Suatu data akan mempunyai nilai informasi bila bermakna bagi seseorang yang menafsirkannya. Kemampuan seseorang untuk memberikan makna pada data akan menentukan kepemilikan informasi. Penafsiran terhadap data atau stimulus yang diterima otak akan menentukan kualitas informasi. Sebagai produk sebuah “pabrik” otak, kualitas informasi sangat ditentukan oleh berbagai



unsur yang digunakan untuk mengolah setiap stimulus yang masuk ke dalam diri seseorang melalui panca indera, kemudian diteruskan ke otak untuk diolah berdasarkan pengetahuan, pengalaman, selera, dan keimanan seseorang. Semakin luas pengetahuan, pengalaman, dan semakin baik selera dan moralitas maka informasi yang dihasilkan semakin berkualitas. Proses di dalam otak manusia tersebut dikenal dengan proses intelektual.

3. Informasi sebagai jumlah ketidakpastian yang diukur dengan cara mereduksi sejumlah alternatif yang ada. Informasi berkaitan erat dengan situasi ketidakpastian. Keadaan yang semakin tidak menentu akan menimbulkan banyak alternatif informasi, yang dapat digunakan untuk mereduksi ketidakpastian.<sup>5</sup>

Pengertian informasi publik mencakup: Pertama, informasi tentang kebijakan nasional yang mempunyai dampak luas dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, oleh karena itu harus diketahui dan dipahami masyarakat. Kedua, informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai penjelasan atas isu yang sedang berkembang di dalam masyarakat.

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, dikelola, dimiliki, dihimpun, atau dikuasai oleh suatu badan publik, sehubungan dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dijalankan

---

<sup>5</sup> Fisher, B. Aubrey. 2007. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 74.

dan melekat pada badan tersebut, dan mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di dunia saat ini, terlebih jika kita tinggal dalam suatu Negara demokrasi yang mengenal adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam memperoleh informasi bagi rakyatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada banyak hal seperti rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan warga Negara yang pada akhirnya juga berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggaraan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang otoriter dan tidak demokratis.

Hak atas informasi tersebut meliputi: (1) hak publik untuk memantau atau mengamati perilaku pejabat publik dalam menjalankan fungsi publiknya, (2) hak publik untuk mendapatkan/mengakses informasi, (3) hak publik untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan, (4) kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan kebebasan pers, (5) hak publik untuk mengajukan keberatan apabila hak-hak di atas diabaikan baik melalui administrasi maupun adjudikasi (menggunakan sarana pengadilan semu, arbitrase maupun pengadilan).

Selain itu penyebaran informasi publik member peluang rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Rakyat yang *well- informed* akan menjadi kekuatan dan aktor dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Hak itu didasarkan pada pemikiran dan pengalaman empiris bahwa:

1. Publik yang lebih banyak mendapat informasi dapat berpartisipasi lebih baik dalam proses demokrasi.
2. Parlemen, pers dan publik harus dapat dengan wajar mengikuti dan meneliti tindakan-tindakan pemerintah, kerahasiaan adalah hambatan terbesar pada pertanggung jawaban pemerintah.
3. Pegawai pemerintahan mengambil keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kepentingan publik, dan agar bertanggung jawab pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan.
4. Arus informasi yang lebih baik menghasilkan pemerintahan yang efektif dan membantu pengembangan yang lebih fleksibel.
5. Kerjasama antara publik dan pemerintah akan semakin erat karena informasi yang semakin banyak tersedia.

Informasi dapat digambarkan sebagai oksigen dalam suatu Negara demokrasi Negara demokrasi terkait dengan pertanggungjawaban dan tata pemerintahan yang baik. Rakyat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Negara, oleh karena itu

pemberian hak kepada rakyat atas informasi merupakan tiang penyangga yang penting bagi demokrasi.

Dalam konteks fasilitasi pelancaran arus informasi kewajiban lembaga informasi publik adalah untuk mendukung penyebaran dan pemerataan informasi publik ke seluruh lapisan masyarakat. Salah satu elemen bagi terciptanya pelancaran arus informasi publik adalah terciptanya jaringan komunikasi dan koordinasi antar lembaga-lembaga pemerintahan di pusat dan daerah dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik, serta terciptanya program-program komunikasi yang konvergen dan sirkular antara lembaga publik dengan masyarakat.

### **2.1.2. Komunikasi Massa**

Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataannya atau maksud dalam pikirannya atau kehendaknya kepada manusia lain. Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan dengan orang lain.

Menurut David K. Berlo (1960) dalam Mulyana (2010:162) memperkenalkan sebuah model komunikasi yang dikenal dengan model SMCR atau *Source* (sumber), *Message* (pesan), *Channel* (saluran), *Receiver* (penerima). Saat ini model Berlo disempurnakan

dengan ditambahkan *Feedback* atau respon balik dari penerima atau *Receiver* kepada sumber atau *Source*.<sup>6</sup>

Ardianto dan Lukiati Komala (2009:73) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu interaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungan dengan membangun hubungan antar sesama, melalui pertukaran informasi, untuk menguatkan sikap dan tingkah laku, komunikasi adalah proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah sikap dan tingkah laku.<sup>7</sup>

Menurut Jay Back dan Frederick C. Whitney dalam Nurudin (2007:5), media massa merupakan media mekanis yang digunakan dalam komunikasi massa.<sup>8</sup> Effendy (2002:53) mendefinisikan media massa sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, bukan untuk sekelompok orang tertentu, karena media massa sifatnya umum dan karena itu ditujukan untuk umum.<sup>9</sup>

Media massa memiliki 4 fungsi utama, diantaranya: (Effendy, 2003:149-150)

1. Menyiarkan informasi

Fungsi ini merupakan fungsi yang pertama dan utama. Informasi dibutuhkan oleh khalayak, karena mereka membutuhkan

---

<sup>6</sup> Mulyana, Deddy. 2010. *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, hal. 162.

<sup>7</sup> Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2009. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, hal. 73.

<sup>8</sup> Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 5.

<sup>9</sup> Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 53.

informasi mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain, dan sebagainya.

## 2. Mendidik

Fungsi yang kedua ialah mendidik. Sebagai sarana pendidikan massa, media massa memuat informasi yang mengandung pengetahuan. Media cetak misalnya, memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya.

## 3. Menghibur

Fungsi menghibur dalam media massa terutama cetak bertujuan untuk mengimbangi berita-berita berat dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan dapat berbentuk cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang, tajuk rencana, dan dapat juga berupa berita yang mengandung minat insani.

## 4. Mempengaruhi

Fungsi mempengaruhi ini yang menyebabkan media massa memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Pers independen, bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan kontrol sosial yang member pengaruh kuat dalam masyarakat.

Pernyataan mengenai keempat fungsi di atas juga diungkap oleh Pareno (2005:7-8), ia menyatakan bahwa fungsi adalah suatu tugas khusus yang dibebankan pada sesuatu. Fungsi media massa adalah tugas khusus yang dibebankan pada media massa.

Keempat fungsi yang telah disebutkan di atas, melekat dalam media massa secara utuh, dalam arti harus dilaksanakan secara bersama-sama, tidak boleh mengutamakan satu atau dua fungsi dan mengabaikan fungsi-fungsi lainnya. Ia mengatakan bahwa fungsi media massa sesungguhnya hanya satu, namun dipilah-pilah menjadi empat fungsi, atau dengan kata lain menyebut *four in one function*.<sup>10</sup>

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu, media massa cetak dan media massa elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah radio siaran, televisi, film dan media *online* (internet). Setiap media massa memiliki karakteristik yang khas.

### **2.1.3. Kebijakan Publik**

Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, dalam kaitan inilah maka mudah dipahami jika kebijakan itu acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik. Makna kebijakan sebagaimana dikemukakan tersebut akan makin jelas bila kita ikut pandangan seorang ilmuwan politik Friederich dalam Wahab (2002:13) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>10</sup> Pareno, Sam Abede. 2005. *Media Massa antara Realitas dan Mimpi*. Surabaya: Papyrus, hal. 7-8.

Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.<sup>11</sup>

Berkenaan dengan kebijakan publik menurut Islamy (2003:2) mengemukakan sebagai berikut:

Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik, hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut diupayakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam apa yang oleh Easton disebut sebagai *authorities in a political system* yaitu oleh para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau peranan.<sup>12</sup>

Kebijakan publik selain dapat menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengatasi isu-isu masyarakat dapat pula dipergunakan untuk menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk, cara bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. Pendapat di atas menegaskan bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau bukanlah merupakan tindakan yang serba acak atau kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan, juga merupakan tindakan yang saling berkaitan dengan berpola yang mengarah

---

<sup>11</sup> Wahab, S.A., 2002. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 13.

<sup>12</sup> Islamy, I., 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, hal. 2.



kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Menurut Winarno (2008:16), dalam kehidupan sehari-hari istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Lebih lanjut Winarno menambahkan untuk keperluan sehari-hari definisi tersebut relatif memadai namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.<sup>13</sup>

Menurut Winarno (2008:15), pada dasarnya kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pendangan kedua berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu,

---

<sup>13</sup> Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo, hal. 16.

dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka kebijakan publik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata yang berisi seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Keputusan pemerintah adalah produk dari pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga setiap kebijakan pemerintah idealnya harus mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Pembuatan kebijakan publik, terjadi melalui proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses dan tahapan. Menurut Winarno (2007:32-34) menjelaskan tahapan-tahapan kebijakan publik sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah itu berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk dalam agenda kebijakan.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk pada agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 15.

didefinisikan, kemudian dicari pemecahan terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives*) yang ada.

### 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

### 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan.

## 5. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, apabila dilihat dari sistem kebijakan secara keseluruhan, maka implementasi kebijakan merupakan salah satu proses dari sistem kebijakan publik secara keseluruhan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik, karena tahapan ini akan menentukan tercapai tidaknya sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Winarno (2007:144) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di berbagai sektor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 32-34.

menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.<sup>16</sup>

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dari rangkaian kegiatan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan yang diuraikan para ahli kebijakan mempunyai kesepakatan bahwa tahap ini mempunyai resiko terjadinya konflik dan hambatan yang tidak diinginkan, sehingga penggunaan penting untuk mengimplementasikan sarana-sarana yang perlu mendapat perhatian sampai dicapainya hasil.

Berbagai tahapan kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, tidak satupun yang melewati tahapan implementasi. Hal ini karena implementasi ini yang merealisasikan kebijakan publik menjadi upaya nyata untuk memenuhi kepentingan publik, sehingga tidak hanya menjadi rencana-rencana bagus di atas kertas semata. Dengan demikian implementasi mempunyai kedudukan penting dalam kebijakan negara karena betapapun baiknya suatu kebijaksanaan yang dirumuskan, tidak akan berdampak apa-apa apabila tidak dilaksanakan.

Menurut Nugroho (2008:460), konteks manajemen implementasi kebijakan berada dalam kerangka *organizing-leading-controlling*. Ketika kebijakan telah dibuat, tugas selanjutnya adalah

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 144.

mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.<sup>17</sup>

Dunn (2000:80) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan aktivitas praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan dasar yang bersifat teoritis. Perhatian utamanya adalah pada pemilihan arah tindakan dan pengamatan bahwa hal tersebut diikuti sampai selesainya waktu pelaksanaan dan tidak kepada pemahaman sifat masalah.<sup>18</sup>

Intinya adalah bahwa proses implementasi kebijakan publik tidak akan mulai sebelum tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap-tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Jadi, dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan tujuan sebelumnya yang tidak hanya mempengaruhi pelaksana kebijakan sebagai penanggung jawab dan mempengaruhi kelompok sasaran, tetapi juga mempengaruhi seluruh elemen yang ada baik secara politik, ekonomi maupun sosial yang akan membawa dampak ataupun

---

<sup>17</sup> Nugroho, R, 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 460.

<sup>18</sup> Dunn, W, 2000. *Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan Wibawa S., dkk)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 80.

akibat-akibat dari pelaksanaan keputusan kebijakan tersebut baik itu secara positif maupun negatif.

2. Implementasi kebijakan merupakan suatu bentuk usaha untuk mengubah tujuan menjadi hasil yang diinginkan dari kebijakan tersebut.
3. Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dari seberapa jauh hasil suatu kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan secara politis keberhasilannya diukur dari seberapa jauh tindakan dari kebijakan tersebut mendapat dukungan dan perhatian yang baik dari para *stakeholder* yang ada di masyarakat.

Pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel yang mempengaruhinya. Kerangka kerja kebijakan publik sangat ditentukan oleh faktor variabel yang terkandung di dalamnya. Variabel yang mempengaruhi suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut (Subarsono, 2005:10):

4. Tujuan yang hendak dicapai.
5. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan.
6. Sumber daya yang mendukung kebijakan.
7. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
8. Lingkungan kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

#### 9. Strategi yang digunakan.<sup>19</sup>

Langkah pertama bagi pembuat kebijakan adalah merumuskan masalah dan menempatkannya dalam agenda kebijakan. Kemudian masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan dicari pemecahannya yang disusun dalam bentuk formulasi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, dipilih yang terbaik dan selanjutnya mencari dukungan dari pihak legislatif dan yudikatif. Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan publik dan telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan, maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun oleh unit kerja pemerintah di tingkat bawah. Setelah kebijakan dilaksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

#### **2.1.4. Impelementasi Kebijakan Publik**

Dalam menelaah suatu proses kebijakan aspek yang sangat penting yaitu implementasi kebijakan. Samodra, et.al. (2003:80) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai dicapainya hasil kebijakan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 10.

<sup>20</sup> Samodra, et.al. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gunung Agung, hal 80.



Sesungguhnya bukanlah implementasi kebijakan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Wahab (2002:59) mengartikan pelaksanaan kebijakan adalah suatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan, kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.<sup>21</sup>

Hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut dapat dilihat setelah kebijakan tersebut diimplementasikan, Van Meter dan Horn (1974) dalam Winarno (2008:146) mengatakan bahwa implementasi kebijakan mempunyai pengertian sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Suharto (2005:87) implementasi kebijakan merupakan pernyataan mengenai cara atau metode dengan kebijakan

---

<sup>21</sup> Wahab, S.A., *Op.Cit.*, hal. 59.

<sup>22</sup> Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo, hal. 146.

diterapkan, termasuk juga pengoperasian alternatif kebijakan yang dipilih melalui beberapa program atau kegiatan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, implementasi merupakan salah satu tahap dari keseluruhan proses kebijakan publik, mulai dari penyusunan agenda kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Dalam praktek implementasi kebijakan negara cenderung mengalami kegagalan. Kegagalan kebijakan dapat disebabkan tidak diimplementasikan, dapat pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah.

Selanjutnya, dalam proses implementasi diperlukan adanya persiapan yang perlu dilakukan sebagaimana dikemukakan Darwin (1998) dalam Widodo (2001:194) setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi dan manfaat publik. Aktivitas implementasi kebijakan publik melibatkan tiga hal, yaitu: (1) aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata

---

<sup>23</sup> Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta, hal. 87.

kembali unit-unit, dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan sasaran kebijakan, (2) aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan, (3) aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada. Dengan demikian implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi dan aplikasi.<sup>24</sup>

Meter dan Horn dalam Winarno (2008:152) menggolongkan kebijakan-kebijakan menurut dua karakteristik yang berbeda, yakni jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana consensus menyangkut tujuan antara pemeran serta dalam proses implementasi berlangsung. Unsur perubahan merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya dalam dua hal:

1. Implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Untuk hal itu, perubahan-perubahan incremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan drastis (rasional).

---

<sup>24</sup> Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, hal. 194.

2. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Ada yang menyarankan bahwa implementasi yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis.<sup>25</sup>

Jika suatu kebijakan tidak tepat waktu atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III dalam Winarno (2008:175-203) menyatakan ada empat faktor penting yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Komunikasi, persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.
2. Sumber-sumber, sumber yang terpenting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

---

<sup>25</sup> Winarno, Budi. *Op. Cit.*, hal. 152.

3. Kecenderungan-kecenderungan, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat. Bila tingkah laku para pelaksana berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.
4. Struktur organisasi, birokrasi secara sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan di institusi-institusi pendidikan dan kadangkala suatu sistem birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.<sup>26</sup>

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks namun di balik kerumitan dan kompleksitasnya tersebut implementasi kebijakan memegang peran cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan juga dipengaruhi konsep nilai kebijakan yang lahir atas kearifan aktor atau lembaga yang bersangkutan.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 175-203.

### **2.1.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Berbagai model dan teori oleh para pakar telah dikembangkan untuk pembahasan tentang implementasi kebijakan Negara baik yang bersifat abstrak maupun yang relatif operasional tergantung pada kompleksitas permasalahan yang akan dikaji. Sebagai pedoman bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan maka semakin mendalam analisis yang dilakukan dan semakin diperlukan model atau teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel yang menjadi fokus analisis.

Untuk menganalisis suatu proses implementasi kebijakan itu berlangsung, dapat dilihat dari berbagai model implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:109-124) mengajukan model mengenai proses implementasi kebijakan. Dalam model ini Van Meter dan Van Horn mendasarkan pada argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian ditegaskan pula bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang sangat penting dalam prosedur implementasi.

Dalam model pendekatan kebijakan *top down* (model rasional) Van Meter dan Van Horn memandang implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dari suatu model konseptual yang mengaitkan kebijakan dengan prestasi kerja. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa perubahan, pengendalian dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur implementasi.<sup>27</sup>

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model proses implementasi kebijakan. Dijelaskan dalam Winarno (2002:109-124) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi enam variabel, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya kebijakan, (3) komunikasi antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik pelaksana, (5) kondisi sosial ekonomi dan politik, (6) organisasi pelaksana.<sup>28</sup>

Menurut Edward III dalam Winarno (2002:109-124), mengajukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Edward III dalam Winarno mengemukakan faktor komunikasi mempunyai tiga dimensi yaitu dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 109-124.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 109-124.

publik tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan agar implementasi kebijakan menjadi efektif. Keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah tersebut dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga pihak-pihak tersebut mengetahui maksud, tujuan, sasaran dan substansi dari kebijakan publik. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami tetapi juga harus jelas. Jika tidak jelas, para pelaksana kebijakan tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu: (1) kompleksitas kebijakan publik, (2) keinginan untuk tidak mengganggu



kelompok masyarakat, kurangnya consensus terhadap tujuan kebijakan, (4) masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, (5) menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan (6) sifat pembuatan kebijakan pengadilan. Ketidakjelasan pesan komunikasi tidak selalu menghalangi implementasi karena pada tataran tertentu para pelaksana dapat bersifat fleksibel dalam melaksanakan kebijakan.

Dimensi ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah yang saling bertentangan akan menyulitkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan tersebut mempunyai unsur kejelasan. Perintah-perintah pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten juga akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan. Bila ini terjadi, maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.

## 2. Sumber Daya

Meski perintah-perintah implementasi disampaikan secara akurat, jelas dan konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan, implementasi tidak akan efektif. Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya meliputi staf dengan jumlah memadai dan keahlian yang tepat untuk menjalankan tugas mereka, serta informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi pelayanan publik yang berfungsi.

## 3. Disposisi (Sikap)

Edward III memandang disposisi sebagai kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauhmana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

## 4. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan cukup dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan dapat jadi masih

belum efektif, karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan luar organisasinya.

## 2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk memperkuat hasil penelitian, berikut adalah beberapa penjelasan yang berhubungan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu yang Relevan**

No.	Jenis, Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Arifin Tahir (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Gorontalo	Komunikasi ( $X_1$ ) Sumberdaya ( $X_2$ ) Disposisi (sikap) ( $X_3$ ) Struktur birokrasi ( $X_4$ ) Keberhasilan implementasi kebijakan (Y)	Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya proses implementasi kebijakan transparansi adalah komunikasi, dimana komunikasi telah berjalan efektif dan didukung pula oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai serta struktur organisasi Komisi Transparansi yang tidak berbelit-belit disamping itu pula responsivitas pemerintah serta tingkat penerimaan masyarakat yang positif. Sedangkan sikap aparatur yang kurang memahami kebijakan transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya proses kebijakan transparansi.

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**

No.	Jenis, Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Anita Yurnalia (2010)	Pengaruh implementasi kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak terhadap efektivitas penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Sosial Kota Bandung	Komunikasi (X <sub>1</sub> ) Sumberdaya (X <sub>2</sub> ) Sikap para pelaksana (X <sub>3</sub> ) Struktur birokrasi (X <sub>4</sub> ) Efektivitas penanganan (Y)	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan terhadap pengaruh implementasi kebijakan pemerintah yang positif dan potensial terhadap efektivitas penanganan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Sosial Kota Bandung
3.	Tesis mahasiswa Universitas Indonesia yang dilakukan oleh Eko Slamet Riyanto (2010)	Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kemkominfo	Komunikasi (X <sub>1</sub> ) Sumberdaya (X <sub>2</sub> ) Disposisi (sikap) (X <sub>3</sub> ) Struktur birokrasi (X <sub>4</sub> ) Keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka
4.	Tesis mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang yang dilakukan oleh Akhmad Zaeni (2006)	Implementasi kebijakan program keluarga berencana di Kabupaten Batang studi kasus peningkatan kesertaan KB pria di Kecamatan Gringsing	Komunikasi (X <sub>1</sub> ) Disposisi (X <sub>2</sub> ) Sumberdaya (X <sub>3</sub> ) Struktur organisasi (X <sub>4</sub> ) Lingkungan (X <sub>5</sub> ) Implementasi kebijakan keluarga	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keluarga berencana di Kabupaten Batang telah berjalan cukup baik, peningkatan kesertaan KB pria sebagai konsekuensi

**Tabel 2.1 (Lanjutan)**

No.	Jenis, Nama, Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			Berencana di Kabupaten Batang (Y)	<p>Dari upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender menuju terwujudnya keluarga berkualitas tahun 2015 telah dilakukan dengan baik, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang indikasinya masih adanya beberapa PLKB yang hanya berpendidikan SLTP di tingkat kecamatan, belum terbentuknya struktur organisasi dan tata kerja di kecamatan yang pasti, menjadikan pola manajemen sumber daya manusia di lapangan kurang maksimal, penggunaan media penyuluhan yang masih konvensional yang hanya memanfaatkan pertemuan-pertemuan dibalai desa, sehingga kurang dapat menyentuh sasaran para pria yang sibuk bekerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia berimplikasi pula terhadap rendahnya komitmen petugas dalam meningkatkan kinerjanya, dan lingkungan kebijakan ternyata juga mempunyai andil yang cukup besar dalam implementasi kebijakan peningkatan kesertaan KB pria di Kecamatan Gringsing</p>

## **BAB III**

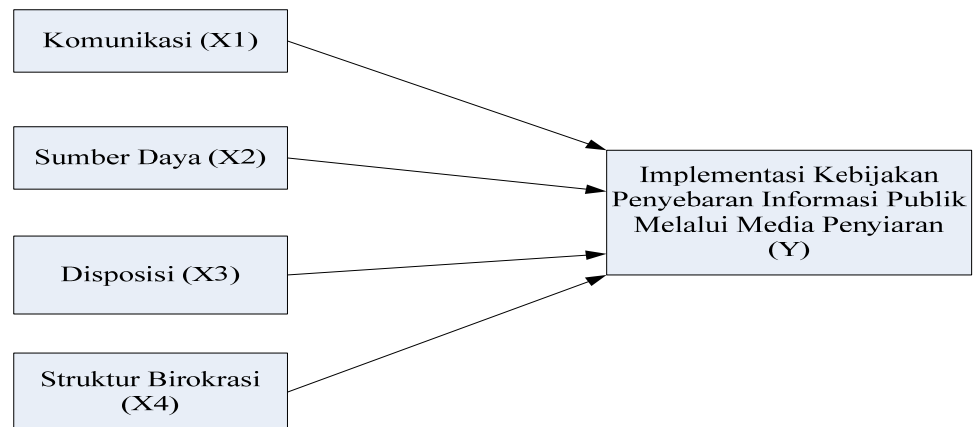
### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Kerangka Penelitian**

Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di Badan Informasi Publik, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi ke masyarakat. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan.

Hak untuk memiliki kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara luas sudah diterima. Hak asasi manusia sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara. Dalam suatu Negara yang masyarakatnya ingin maju berkembang, adanya transparansi kebijakan dan keterbukanya ruang publik untuk mengakses informasi sangatlah dibutuhkan. Kebebasan memperoleh informasi sebagai suatu hak asasi manusia sudah seharusnya dikelola oleh lembaga-lembaga pemerintah/publik karena lembaga ini memegang informasi tidak untuk diri

mereka sendiri tetapi untuk kepentingan umum atau informasi sebagai milik masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini variabel independen adalah komunikasi ( $X_1$ ), sumber daya ( $X_2$ ), disposisi ( $X_3$ ), dan struktur birokrasi ( $X_4$ ) dan sebagai variabel dependen adalah implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran. Seperti pada gambar di atas.

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan dibawah ini:

1. Pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran.

Salah satu faktor yang berpengaruh supaya terciptanya peningkatan efisiensi kerja adalah terjalannya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara para pelaksana (implementator) dan regulator. Komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi kebijakan,

dimana para pelaksana (implementator) harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Sehingga proses komunikasi antar karyawan TVRI dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Komunikasi menggambarkan suatu proses yang menghubungkan unsur-unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi kebijakan dimaksudkan untuk memudahkan karyawan TVRI. Dalam proses komunikasi, setiap unsur yang ada di stasiun TVRI Pusat merupakan penentu keberhasilan komunikasi kebijakan sehingga dapat tepat sasaran. Komunikasi yang dilaksanakan dengan sasaran kepada objek komunikasi yaitu karyawan TVRI Pusat pada khususnya dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran kepada masyarakat.

Proses komunikasi kebijakan berdasarkan mekanisme yang baik yaitu kejelasan komunikasi (informasi yang disampaikan), konsistensi komunikasi, media penyebaran informasi, konten informasi dan kemasan informasi. Dengan komunikasi yang baik tersebut karyawan TVRI Pusat mengetahui nilai-nilai dalam proses komunikasi. Komunikasi kebijakan ialah proses komunikasi yang terjadi dalam suatu kebijakan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja kebijakan tersebut. Tugas inti dari karyawan TVRI Pusat adalah mengkomunikasikan kebijakan dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang maksud dan tujuan dari materi yang dikomunikasikan. Pesan-pesan yang disampaikan oleh karyawan TVRI Pusat kadangkala



berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh aparatur pemerintah dan karyawan TVRI Pusat tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain.

2. Pengaruh sumber daya terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran.

Sumber daya merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, terdapat sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja. sumber-sumber kebijakan tersebut antara lain sumber daya manusia, informasi, fasilitas (sarana dan prasarana) dan wewenang.

Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, sumber daya manusia yang diperlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidangnya.

3. Pengaruh disposisi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika karyawan TVRI Pusat setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dijalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya kebijakan yang telah dibuat.

Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan kebijakan secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran.

Dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para karyawan TVRI Pusat tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi karyawan TVRI Pusat kebanyakan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan leluasa. Alasannya adalah menyangkut dengan komitmen karyawan TVRI Pusat dengan ditetapkannya kebijakan dengan ketetapan pemerintah sebagai sebuah komitmen pekerjaan.

4. Pengaruh struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran.

Struktur birokrasi merupakan yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan akan tercapai keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran. hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan.

5. Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat akan tergantung pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan tidak hanya ditentukan

oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu diimplementasikan.

### **3.2. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2009:93). Hipotesis yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1.  $H_a : \beta_1 > 0$  ; Terdapat pengaruh antara komunikasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.
2.  $H_a : \beta_2 > 0$  ; Terdapat pengaruh antara sumber daya terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.
3.  $H_a : \beta_3 > 0$  ; Terdapat pengaruh antara disposisi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.
4.  $H_a : \beta_4 > 0$  ; Terdapat pengaruh antara struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.
5.  $H_a : \beta_{1,2,3,4} > 0$  ; Terdapat pengaruh antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.

### **3.3. Desain Penelitian**

Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor

---

<sup>29</sup> Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, hal. 93.

yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.

Berdasarkan tingkat penjelasan yang ingin dihasilkan untuk menjawab permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat paparan pada variabel-variabel yang diteliti, misalnya tentang siapa, yang mana, kapan, dan di mana, maupun ketergantungan variabel pada sub-sub variabelnya.<sup>30</sup> Studi dengan desain ini dapat dilakukan secara sederhana atau rumit dan dapat melibatkan data kuantitatif yang dilengkapi dengan data kualitatif.<sup>31</sup> Dengan demikian, hasil penelitian dengan desain ini akan menghasilkan informasi yang komprehensif mengenai variabel yang diteliti.<sup>32</sup> Sedangkan manfaat penggunaan penelitian deskriptif, menurut Kuncoro (2003:9), selain untuk mengenali distribusi dan perilaku data yang dimiliki juga sebagai dasar pengambilan keputusan.<sup>33</sup> Menurut jenis datanya, penelitian ini menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan untuk saling melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang akan diteliti dan mempertajam analisis penelitian.

---

<sup>30</sup> Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 8.

<sup>31</sup> *Ibid.* hal. 8.

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 8.

<sup>33</sup> Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, hal. 9.

### 3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel penelitian adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.

Rincian variabel, dimensi, dan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Operasional Variabel**

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
1.	Komunikasi (X <sub>1</sub> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kejelasan komunikasi (informasi yang disampaikan)</li><li>2. Konsistensi komunikasi</li><li>3. Media penyebaran informasi</li><li>4. Konten informasi</li><li>5. Kemasan informasi</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Penjelasan narasumber tentang informasi yang disampaikan</li><li>b. Isi pesan yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat memiliki kesan<ol style="list-style-type: none"><li>a. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat yang disampaikan di stasiun televisi sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah</li></ol></li><li>a. Media penyebaran informasi yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat sudah sesuai<ol style="list-style-type: none"><li>a. Materi dari informasi yang disampaikan melalui media penyiaran ini sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah</li></ol></li><li>a. Kemasan iklan yang dibuat sangat menarik perhatian</li></ol>
2.	Sumber daya (X <sub>2</sub> )	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya sumber daya manusia</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kesiapan penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan pihak media penyiaran</li><li>b. Kesiapan karyawan TVRI di pusat maupun daerah dalam</li></ol>

**Tabel 3.1. (Lanjutan)**

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
		<p>b. Kualitas narasumber (pemberi informasi yang kompeten dibidang informasi yang disampaikan)</p>	<p>menyampaikan kebijakan melalui media penyiaran baik itu penyiaran yang ada di pusat maupun daerah</p> <p>a. Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media penyiaran</p> <p>b. Bintang iklan menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik adalah artis atau tokoh yang dapat menyakinkan masyarakat tentang kebijakan tersebut</p>
3.	Disposisi (X <sub>3</sub> )	<p>1. Kemampuan pelaksana</p> <p>2. Tindakan atau sikap terhadap informasi yang baru</p> <p>3. Peran serta dalam proses penyebaran informasi</p>	<p>a. Kesiapan karyawan TVRI dalam menyampaikan informasi ke masyarakat</p> <p>b. Kemampuan karyawan TVRI dalam melaksanakan penyampaian informasi kepada masyarakat</p> <p>a. Respon karyawan TVRI atas informasi yang didapat atas kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah</p> <p>b. Karyawan TVRI sangat terbuka terhadap informasi yang baru dari pemerintah mengenai kebijakan yang dikeluarkan</p> <p>a. Peran serta karyawan TVRI dalam mensosialisasikan kebijakan ke masyarakat</p> <p>b. Koordinasi antara aparat pemerintah dengan stasiun TVRI dalam menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah</p>

**Tabel 3.1. (Lanjutan)**

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
4.	Struktur Birokrasi ( $X_4$ )	1. Hubungan dengan pihak terkait  2. Strategi penyebaran informasi	a. Pemerintah bekerjasama dengan pihak stasiun TVRI dalam mensosialisasikan kebijakan yang dijalankan b. Stasiun TVRI bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat a. Stasiun TVRI memiliki strategi dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui iklan pelayanan masyarakat dengan menggunakan bintang iklan yang familiar b. Stasiun TVRI dalam melakukan penyebaran informasi dengan berbagai strategi, seperti melaksanakan event-event sosialisasi ke masyarakat dengan cara melakukan peliputan khusus
5.	Impelementasi Kebijakan Penyebaran Informasi melalui media penyiaran (Y)	1. Tingkat pemahaman karyawan TVRI terhadap informasi yang disampaikan	a. Media iklan layanan masyarakat yang digunakan untuk mendukung penyebaran informasi ke masyarakat dirasakan efektif dan efisien b. Melalui iklan layanan masyarakat yang disampaikan TVRI memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah c. Iklan layanan masyarakat menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami d. Tingkat pemahaman karyawan TVRI Pusat beragam terhadap kebijakan yang disebarkan



**Tabel 3.1. (Lanjutan)**

No.	Variabel	Dimensi	Indikator
			melalui iklan layanan masyarakat e. Iklan layanan masyarakat yang disampaikan memiliki kesan tersendiri

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengambilan Sampel**

#### **3.5.1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan maksud agar didapatkan data primer sebagai data empiris yang berhubungan dengan variabel penelitian, yang dilakukan dengan cara penyebaran angket berupa kuesioner, dengan jawaban bersifat tertutup, artinya responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Angket digunakan dengan metode skala sikap, yaitu skala Likert. Dalam skala Likert ini, setiap pertanyaan berisi lima alternatif jawaban dengan gradasi dari positif sampai dengan negatif.

#### **3.5.2. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>34</sup> (Sugiono, 2009:90), dan pengertian populasi menurut (Irawan,

---

<sup>34</sup> Sugiyono. *Op.Cit.*, hal. 90.

2003:72) adalah sekumpulan elemen yang akan dijelaskan oleh seorang peneliti di dalam penelitiannya.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud dari karyawan stasiun televisi TVRI sebagai implementator sebanyak 200 karyawan.

### **3.5.3. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2009:91).<sup>36</sup> Mengingat tujuannya, sampel ditetapkan untuk menarik informasi apa yang ada dalam sampel yang kemudian ditarik kesimpulan mengenai populasinya, maka sangat penting untuk mendefinisikan populasi yang menjadi sasaran, sehingga mendapatkan suatu sampel yang mewakili populasi tersebut.

Dalam penetapan sampel, sering timbul pertanyaan mengenai besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang mewakili. Ukuran sampel dan teknik sampling tergantung dari sifat populasi. Semakin homogen populasi, sampel semakin besar.

Pada penelitian ini peneliti mendapatkan populasi sebanyak 200 maka menurut tabel Krejcie dan Morgan dengan tingkat kepercayaan 95%, sehingga jumlah sampel 130 dimana telah

---

<sup>35</sup> Irawan, P., 2003. *Logika dan Prosedur Penelitian*, 5 rd ed, Jakarta: STIA\_LAN Press, hal.72.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Op.Cit.* hal.91.

dianggap mewakili semua populasi (Uma Sekaran, 2006:159).<sup>37</sup>

Tabel Krejcie dan Morgan terlampir.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sebanyak 130 kuesioner untuk masyarakat telah disebar, dan data yang dapat diolah untuk masyarakat sebanyak 130 kuesioner.

#### **3.5.4. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel digunakan dengan teknik *sampling insidental*, menurut Sugiyono (2009:96) *sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>38</sup> Kelompok yang dimaksud dalam penelitian ini adalah karyawan stasiun televisi TVRI.

### **3.6. Uji Instrumen**

#### **3.6.1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang didapatkan dalam penelitian ini (Ghozali, 2011:53).<sup>39</sup> Maksudnya untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner dilihat jika pertanyaan dalam kuesioner

---

<sup>37</sup> Krejcie dan Morgan (1970) dalam Uma Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat, p. 159.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: BP UNDIP, hal. 45.

tersebut mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Setelah itu tentukan hipotesis  $H_0$ : skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk dan  $H_a$ : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. Setelah menentukan hipotesis  $H_0$  dan  $H_a$ , kemudian uji dengan membandingkan  $r_{hitung}$  (tabel *corrected item-total correlation*) dengan  $r_{tabel}$  (tabel *Product Moment* dengan signifikan 0.05) untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$ .

Dasar mengambil keputusan:

- Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
- Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka instrumen atau item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

### 3.6.2. Uji Reliabilitas

Instrumen dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari *cronbach alpha*  $> 0.60$  maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2011: 48).<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal. 48.

### 3.7. Metode Analisis

#### 3.7.1. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

##### 1. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)* serta besaran korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011:91).<sup>41</sup> Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka *tolerance* mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0.05). Jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multiko.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 91.

## 2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik *plot* antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik *plot* menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik *plot* tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:105).<sup>42</sup>

## 3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan *Normal Probability Plot (P-P Plot)*. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Santoso, 2004:212).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 105.

<sup>43</sup> Santoso, Singgih, 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hal. 212.

### 3.7.2. Uji Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163).<sup>44</sup> Variabel independen terdiri dari kompetensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan variabel dependennya adalah implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.

Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran

a : Konstanta (harga Y, bila X=0)

b<sub>1-4</sub>: Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X<sub>1</sub> : Komunikasi

X<sub>2</sub> : Sumber daya

X<sub>3</sub> : Disposisi

X<sub>4</sub> : Struktur birokrasi

e : *Error*

Pengujian hipotesis dilakukan melalui:

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 163.

## 1. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:83).<sup>45</sup>

## 2. Uji t

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0.05 (Ghozali, 2011:84).<sup>46</sup>

Menurut Santoso (2004:168) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara

---

<sup>45</sup> Ghozali, *Op. Cit.*, hal. 83.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>47</sup> Santoso, *Op.Cit.*, 168.



individual terhadap variabel dependen atau terikat.

- b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat.

### 3. Uji F

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0.05 (Ghozali, 2011:84).<sup>48</sup> Menurut Santoso (2004:120) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak, ini berarti menyatakan tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- b. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka  $H_0$  ditolak atau  $H_a$  diterima, ini berarti menyatakan bahwa pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

---

<sup>48</sup> Ghozali, *Op. Cit.*, hal. 84.

<sup>49</sup> Santoso, *Op. Cit.*, hal. 120.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

TVRI Nasional berdiri pada 24 Agustus 1962 (berdasarkan SK Menpen RI No.20/SK/VII/61) ditandai dengan siaran perdana Asian Games di Stadion Utama Gelanggang Olah Raga Bung Karno. Pada saat itu TVRI menyiarkan event-event Asian Games dengan menggunakan pemancar berkekuatan 10 kilo watt dengan nama Saluran 5. TVRI merupakan bagian dari Biro dan Televisi-*Organizing Comitte Asian Games IV*. Artinya payung hukum status TVRI pada waktu itu berada pada naungan NOC. Asian games IV, bukan dibawah Departemen Penerangan. Status TVRI pada saat itu berbentuk yayasan TVRI yang bertanggung jawab langsung pada Presiden.

Tahun 1976 berubah status menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) dibawah Departemen Penerangan. Memasuki era reformasi bersamaan dengan dilikuidasinya Departemen Penerangan, melalui Keppres No. 355/M/1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional dan mandulnya UU No. 24 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Penyiaran, maka status hukum TVRI “mengambang”. Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melaui Kepmen No.101/KEP/M.PAN/1/2000 (5 Januari 2000) menugaskan pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Televisi serta unit pelaksana teknis di Jakarta dan Daerah untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat itu.

Tahun 2000 berubah status menjadi PERJAN (Perusahaan Jawatan) berdasarkan PP No. 36 tahun 2000 tentang Pendidikan Perusahaan Jawatan TVRI tanggal 7 Juni 2000. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia. TVRI dengan PP ini memperoleh kejelasan status hukum yakni sebagai perusahaan jawatan yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi sesuai dengan prinsip-prinsip televisi publik, independen, netral, mandiri dan program siarannya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta tidak semata-mata mencari keuntungan, dan menyelenggarakan kegiatan usaha jasa penyiaran publik dalam bidang informasi, pendidikan, dan hiburan serta usaha-usaha terkait lainnya yang dilakukan dengan standar yang tinggi.

Bulan Juni 2000, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2000 tentang perubahan status TVRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), yang secara kelembagaan berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab kepada Departemen Keuangan RI.

Bulan Oktober 2001, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 2001 tentang pembinaan Perjan TVRI di bawah kantor Menteri Negara BUMN dan Departemen Keuangan RI untuk urusan organisasi dan keuangan.

Tanggal 17 April 2002, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2002, status TVRI diubah menjadi Perseroan terbatas (PT) TVRI di bawahan pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara BUMN.

Televisi Republik Indonesia (TVRI) merupakan stasiun televisi tertua di Indonesia dan satu-satunya televisi yang jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah penonton sekitar 82 persen penduduk Indonesia. Saat ini TVRI memiliki 22 stasiun daerah dan 1 stasiun pusat didukung oleh 395 pemancar yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Karyawan TVRI berjumlah 6.823 orang diseluruh daerah Indonesia dan sekitar 2.000 orang diantaranya adalah karyawan kantor pusat dan TVRI stasiun pusat Jakarta.

TVRI bersiaran dengan menggunakan dua system yaitu VHF dan UHF, setelah selesainya dibangun pemancar Gunung Tela Bogor pada 18 Mei 2002 dengan kekuatan 80 Kw. Kota-kota yang telah menggunakan UHF yaitu Jakarta, Bandung dan Medan, selain beberapa kota kecil seperti di Kalimantan dan Jawa Timur. TVRI pusat Jakarta setiap hari melakukan siaran selama 19 jam, mulai pukul 05.00 WIB hingga 24.45 WIB dengan substansi acara bersifat informatif, edukatif dan entertain. TVRI juga memiliki program 2 Jakarta, pada saluran/chanel 8 VHF. Program 2 mulai mengudara pada 1 Januari 1983 dengan cara tunggal siaran Berita bahasa Inggris dengan nama *Six Thirty Report* selama setengah jam pukul 18.30 WIB, dibawah tanggung jawab bagian Pemberitaan.

Pada perkembangannya rubrik tersebut berubah nama menjadi *English News Service* (ENS). Program 2 TVRI kini mengudara mulai pukul 17.30-21.00 WIB dengan berbagai jenis acara berita dan hiburan.

Sekarang ini tengah dilakukan negosiasi dengan pihak swasta untuk bekerjasama dibidang manajemen produksi dan siaran program 2 TVRI Jakarta dan sekitarnya, dengan adanya rencana perubahan frekuensi dari VHF ke UHF. Dibidang isi siaran akan lebih ditekankan kepada paket-paket jadi dengan materi siaran untuk konsumsi masyarakat metropolitan Jakarta.

Dengan perubahan status TVRI dari Perusahaan Jawatan ke TV Publik sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, maka TVRI diberi masa transisi selama 3 tahun dengan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2002 dimana disebutkan TVRI berbentuk Persero.

Melalui Persero ini pemerintah mengharapkan Direksi TVRI dapat melakukan pembenahan-pembenahan baik dibidang manajemen, struktur organisasi, SDM dan keuangan.

Sehubungan dengan itu Direksi TVRI tengah melakukan konsolidasi, melalui restrukturisasi, pembenahan dibidang *marketing* dan *programming*, mengingat sikap mental karyawan dan hampir semua acara TVRI masih mengacu pada status Perjan yang kurang memiliki nilai jual. Restrukturisasi bukan berarti adanya pengurangan sumber daya manusia atau penambahan modal, karena semua itu harus memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Khusus mengenai karyawan, Direksi TVRI melalui restrukturisasi akan diketahui jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan, berdasarkan kemampuan masing-masing individu karyawan untuk mengisi fungsi-fungsi yang ada dalam struktur organisasi sesuai keahlian dan profesi masing-masing, dengan kualifikasi yang jelas.

Melalui restrukturisasi tersebut akan diketahui apakah untuk mengisi fungsi tersebut diatas dapat diketahui, dan apakah perlu dicari tenaga professional dari luar atau dapat memanfaatkan sumber daya TVRI yang tersedia. Dalam bentuk Persero selama masa transisi ini, TVRI benar-benar diuji untuk belajar mandiri dengan menggali dana dari berbagai sumber antara lain dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar baik swasta maupun sesama BUMN serta meningkatkan profesionalisme karyawan. Dengan adanya masa transisi selama 3 tahun ini, diharapkan TVRI akan dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh undang-undang penyiaran yaitu sebagai TV publik dengan sasaran khalayak yang jelas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 tahun 2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun visi dan misi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, yaitu:

#### 1. Visi

Terwujudnya TVRI sebagai media pilihan bangsa Indonesia dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memperkuat kesatuan nasional.

## 2. Misi

- a. Mengembangkan TVRI menjadi media perekat sosial untuk persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus media kontrol sosial yang dinamis.
- b. Mengembangkan TVRI menjadi pusat layanan informasi dan edukasi yang utama.
- c. Memberdayakan TVRI menjadi pusat pembelajaran bangsa serta menyajikan hiburan yang sehat dengan mengoptimalkan potensi dan kebudayaan daerah serta memperhatikan komunitas terabaikan.
- d. Memberdayakan TVRI menjadi media untuk membangun citra bangsa dan Negara Indonesia di dunia internasional.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diukur menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan persentase jenis kelamin responden, pendidikan terakhir responden dan status pernikahan responden. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan stasiun televisi TVRI. Kuesioner disebar dengan harapan dapat diisi berdasarkan karyawan, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang *balance*.

#### 4.2.1.1. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Ditinjau dari sudut jenis kelaminnya, karyawan yang disurvei sebanyak 130 orang tersebut, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 67 orang atau 51,5% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 63 orang atau 48,5%. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa

perbandingan antara karyawan laki-laki dan perempuan tidak terlalu besar, hal ini dikarenakan oleh responden yang ditemui peneliti menunjukkan tidak adanya perbedaan gender dalam melakukan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan sehingga siapa saja dapat melakukan pekerjaan tersebut tanpa harus membeda-bedakan gender dalam bekerja. Berdasarkan komposisi jenis kelamin tersebut terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Komposisi Responden**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1.	Laki-laki	67	51,5
2.	Perempuan	63	48,5
Total		130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

#### **4.2.1.2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Ditinjau dari sudut pendidikan terakhir, karyawan yang disurvei sebanyak 130 orang tersebut, yang memiliki pendidikan terakhir SMU sebanyak 2 orang atau 1,5%, pendidikan terakhir D3 sebanyak 42 orang atau 32,3%, pendidikan terakhir S1 sebanyak 79 orang atau 60,8%, dan yang memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 7 orang atau 5,4%. Hasil jawaban yang diberikan responden tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah mereka yang memiliki pendidikan terakhir Strata Satu (S1), hal ini karena Stasiun TVRI memberikan persyaratan kepada setiap karyawan yang ingin menjadi karyawan minimal harus memiliki



pendidikan terakhir Strata Satu (S1), sehingga dari jawaban yang telah dikumpulkan peneliti menunjukkan hal yang sama atau sesuai dengan persyaratan yang diberikan Stasiun TVRI, adapun karyawan yang memiliki pendidikan terakhir SMU dan Diploma (D3), mereka adalah karyawan yang sudah lama bekerja di Stasiun TVRI, hal ini karena pada periode mereka persyaratan tersebut belum menjadi ketetapan Stasiun TVRI dalam merekrut karyawannya. Berdasarkan komposisi pendidikan terakhir tersebut terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Komposisi Responden**  
**Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1.	SMU	2	1,5
2.	D3	42	32,3
3.	S1	79	60,8
4.	S2	7	5,4
Total		130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

#### **4.2.1.3. Komposisi Responden Berdasarkan Status Pernikahan**

Ditinjau dari sudut status pernikahan, karyawan yang disurvei sebanyak 130 orang tersebut, karyawan yang memiliki status menikah sebanyak 64 orang atau 49,2% dan karyawan yang memiliki status belum menikah sebanyak 66 orang atau 50,8%. Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa hampir tidak ada perbedaan antara karyawan yang sudah memiliki status menikah dengan karyawan yang memiliki status belum menikah.

Berdasarkan komposisi status pernikahan tersebut terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.3.**  
**Komposisi Responden**  
**Berdasarkan Status Pernikahan**

No.	Status Pernikahan	Frekuensi	%
1.	Menikah	64	49,2
2.	Belum Menikah	66	50,8
Total		130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

#### 4.2.2. Hasil Uji Kualitas Data

##### 4.2.2.1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau  $r_{hitung}$  dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan  $r_{tabel}$ . Nilai  $r_{tabel}$  0,172, didapat dari jumlah responden ( $n - 2$ ), atau  $130 - 2 = 128$ , tingkat signifikansi 5%, maka didapat  $r_{tabel}$  0,172. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan  $r_{tabel}$  (Ghozali, 2011:53). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari masing-masing variabel dengan 130 sampel responden.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Nilai <math>r_{hitung}</math></b>	<b>Nilai <math>r_{tabel}</math></b>	<b>Kriteria</b>
Komunikasi ( $X_1$ )	Item 1	0,445	0,172	Valid
	Item 2	0,605	0,172	Valid
	Item 3	0,629	0,172	Valid
	Item 4	0,532	0,172	Valid
	Item 5	0,583	0,172	Valid
	Item 6	0,554	0,172	Valid
Sumber Daya ( $X_2$ )	Item 1	0,703	0,172	Valid
	Item 2	0,643	0,172	Valid
	Item 3	0,611	0,172	Valid
	Item 4	0,508	0,172	Valid
Disposisi ( $X_3$ )	Item 1	0,554	0,172	Valid
	Item 2	0,638	0,172	Valid
	Item 3	0,647	0,172	Valid
	Item 4	0,515	0,172	Valid
	Item 5	0,670	0,172	Valid
	Item 6	0,542	0,172	Valid
Struktur Birokrasi ( $X_4$ )	Item 1	0,612	0,172	Valid
	Item 2	0,524	0,172	Valid
	Item 3	0,642	0,172	Valid
	Item 4	0,412	0,172	Valid
Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran (Y)	Item 1	0,470	0,172	Valid
	Item 2	0,721	0,172	Valid
	Item 3	0,629	0,172	Valid
	Item 4	0,632	0,172	Valid
	Item 5	0,430	0,172	Valid

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penulis dari setiap variabel dinyatakan valid semua, karena nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan kepada responden dari setiap variabel penelitian mampu mengukur apa yang diinginkan oleh responden.

#### 4.2.2.2. Hasil Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui tingkat keandalan pengukuran, dilakukan pengujian dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2007 dan SPSS ver 16. Pengolahan dilakukan dengan menjumlahkan skor pertanyaan. Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrument penelitian. Suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* berada diatas 0.60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2011: 48).<sup>50</sup>

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach's Alpha</i></b>	<b><i>N of Items</i></b>	<b>Keterangan</b>
Komunikasi (X <sub>1</sub> )	0,753	6	Reliabel
Sumber Daya (X <sub>2</sub> )	0,799	4	Reliabel
Disposisi (X <sub>3</sub> )	0,819	6	Reliabel
Struktur Birokrasi (X <sub>4</sub> )	0,748	4	Reliabel
Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran (Y)	0,791	5	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Tabel 4.5 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel komunikasi sebesar 0,753, variabel sumber daya sebesar 0,799, variabel disposisi sebesar 0,819, variabel struktur birokrasi sebesar 0,748 dan variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran sebesar 0,791. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini

---

<sup>50</sup> Ghozali, *Op. Cit.*, hal. 48.

reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

#### 4.2.2.3. Hasil Uji Distribusi Frekuensi Pertanyaan Responden

Selain uji validitas dan reliabilitas pada kuesioner. Penelitian ini juga terdapat pertanyaan tentang lima variabel dalam penelitian ini yang terdiri dari komunikasi ( $X_1$ ), sumber daya ( $X_2$ ), disposisi ( $X_3$ ), struktur birokrasi ( $X_4$ ) dan implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran ( $Y$ ). Berikut ini adalah jumlah hasil dari distribusi frekuensi jawaban dari tiap masing-masing variabel.

##### 4.2.2.3.1. Hasil Uji Distribusi Frekuensi Variabel Komunikasi ( $X_1$ )

Berikut ini disajikan tabel-tabel yang menggambarkan pertanyaan-pertanyaan dari variabel komunikasi.

**Tabel 4.6**  
**Karyawan TVRI memahami penjelasan narasumber tentang informasi yang disampaikan**

Keterangan	Frekuensi	%
Sangat setuju	23	17,7
Setuju	43	33,1
Kurang setuju	45	34,6
Tidak setuju	19	14,6
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI masih bersifat negatif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 45 responden atau 34,6% responden menjawab kurang setuju. Tabel tersebut mengandung arti bahwa di dalam proses menyampaikan informasi seorang narasumber dituntut untuk memahami karakter dari orang yang akan diberikan informasi, dalam hal penyampaian informasi kepada karyawan TVRI, pemerintah sebagai regulator harus menunjuk orang yang tepat agar kebijakan yang ingin dipublikasikan ke masyarakat melalui media penyiaran, dalam hal ini karyawan TVRI sebagai implementatornya harus terlebih dahulu diberikan penjelasan secara mendetail tentang informasi yang akan disampaikan kepada publik.

**Tabel 4.7**  
**Isi pesan yang disampaikan**  
**melalui iklan layanan masyarakat memiliki kesan**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	8	6,2
setuju	44	33,8
Kurang setuju	45	34,6
Tidak setuju	33	25,4
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI masih bersifat negatif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 45 responden atau 34,6% responden menjawab kurang setuju. Dari jawaban responden tersebut

terlihat bahwa masih kurangnya tingkat kepercayaan yang diberikan karyawan TVRI kepada pemerintah apabila pemerintah menyampaikan isi pesan dalam iklan layanan masyarakat yang akan diberikan kepada masyarakat, hal ini karena karyawan TVRI menganggap bahwa isi pesan tersebut menggunakan bahasa yang baku, arti karyawan merasa kalau isi pesan tersebut disampaikan kepada masyarakat luas maka masyarakat tidak semuanya paham akan pesan kebijakan yang disampaikan.

**Tabel 4.8**  
**Informasi yang disampaikan kepada masyarakat**  
**melalui iklan layanan masyarakat di stasiun televisi TVRI sudah sesuai**  
**dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	6	4,6
setuju	39	30
Kurang setuju	44	33,8
Tidak setuju	37	28,5
Sangat tidak setuju	4	3,1
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI masih bersifat negatif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 44 responden atau 33,8% responden menjawab kurang setuju, hal ini mengandung arti bahwa dirasakan kurang oleh para karyawan TVRI karena informasi yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh karyawan TVRI tersebut masih kurang relevan

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal tersebut disebabkan oleh informasi yang telah disampaikan aparat pemerintah yang kurang sesuai dengan kebijakan yang seharusnya disampaikan.

**Tabel 4.9**  
**Media penyebaran informasi yang disampaikan**  
**melalui iklan layanan masyarakat**  
**sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	6	4,6
Setuju	41	31,5
Kurang setuju	52	40
Tidak setuju	27	20,8
Sangat tidak setuju	4	3,1
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI masih bersifat negatif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 52 responden atau 40% responden menjawab kurang setuju. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa sebenarnya karyawan TVRI Pusat merasa masih kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat kurang maksimal.



**Tabel 4.10**  
**Materi dari informasi yang disampaikan**  
**melalui media penyiaran ini sudah sesuai**  
**dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	8	6,2
Setuju	34	26,2
Kurang setuju	61	46,9
Tidak setuju	21	16,2
Sangat tidak setuju	6	4,6
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI masih bersifat negatif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 61 responden atau 46,9% responden menjawab kurang setuju. Berdasarkan jawaban responden dapat terlihat bahwa materi iklan layanan masyarakat yang akan dibuat belum sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena masih terjadinya perbedaan persepsi antara karyawan TVRI dengan pemerintah dalam membuat iklan layanan masyarakat. Hal ini yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat luas sehingga diharapkan materi iklan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat.

**Tabel 4.11**  
**Kemasan iklan yang dibuat**  
**sangat menarik perhatian**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	19	14,6
Setuju	75	57,7
Kurang setuju	30	23,1
Tidak setuju	6	4,6
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI masih bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 75 responden atau 57,7% responden menjawab setuju. Hal ini disebabkan oleh pemerintah dan karyawan TVRI telah menyamakan persepsinya mengenai materi isi iklan tersebut sehingga kemasan iklan dapat sesuai dengan keinginan yang diharapkan yaitu menarik perhatian pemirsa apabila menonton iklan layanan masyarakat tersebut, yang berakibat pada informasi yang disampaikan melalui media penyiaran dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

#### **4.2.2.3.2. Hasil Uji Distribusi Frekuensi Variabel Sumber Daya ( $X_2$ )**

Berikut ini disajikan tabel-tabel yang menggambarkan pertanyaan-pertanyaan dari variabel sumber daya.

**Tabel 4.12**  
**Kesiapan penyampaian informasi**  
**yang dilakukan pemerintah dan pihak media penyiaran**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	22	16,9
Setuju	73	56,2
Kurang setuju	24	18,5
Tidak setuju	8	6,2
Sangat tidak setuju	3	2,3
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI masih bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 73 responden atau 56,2% responden menjawab setuju. Berdasarkan dari jawaban responden tersebut menunjukkan bahwa adanya kesiapan yang telah dilakukan oleh sumber daya manusia dalam hal ini adalah karyawan TVRI dan aparat pemerintah ketika menyampaikan informasi kebijakan yang disampaikan melalui media penyiaran, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi apa yang sebenarnya diberikan dalam kebijakan tersebut.

**Tabel 4.13**  
**Kesiapan karyawan TVRI baik di pusat maupun daerah dalam**  
**menyampaikan kebijakan melalui media penyiaran**  
**baik itu penyiaran yang ada di pusat maupun daerah**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	19	14,6
Setuju	67	51,5
Kurang setuju	31	23,8
Tidak setuju	11	8,5
Sangat tidak setuju	2	1,5
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 67 responden atau 51,5% responden menjawab setuju. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa pada dasarnya karyawan TVRI pusat dan daerah sudah siap untuk menyampaikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki pusat dan daerah hampir sama sehingga dalam menyampaikan informasi kebijakan dapat berjalan dengan cepat dan tepat.

**Tabel 4.14**  
**Penyebaran informasi publik mengenai**  
**kebijakan pemerintah telah dilakukan**  
**dengan memanfaatkan berbagai media penyiaran**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	14	10,8
Setuju	71	54,6
Kurang setuju	33	25,4
Tidak setuju	7	5,4
Sangat tidak setuju	5	3,8
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 71 responden atau 54,6% responden menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa karyawan TVRI berpendapat apabila pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan

publik seharusnya pemerintah tidak hanya menggunakan media penyiaran saja dalam hal ini adalah iklan layanan masyarakat, karena hasil penyebaran informasi nantinya akan kurang efektif, dan seharusnya pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah kebijakan.

**Tabel 4.15**  
**Bintang iklan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik adalah artis atau tokoh yang dapat menyakinkan masyarakat**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	28	21,5
Setuju	55	42,3
Kurang setuju	28	21,5
Tidak setuju	17	13,1
Sangat tidak setuju	2	1,5
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 55 responden atau 42,3% responden menjawab setuju. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan TVRI merasa yakin kepada artis yang memiliki wajah yang familiar dapat memberikan pengaruh yang positif ketika artis tersebut menyampaikan informasi mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat mengerti maksud dan tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

#### 4.2.2.3.3. Hasil Uji Distribusi Frekuensi Variabel Disposisi (X<sub>3</sub>)

Berikut ini disajikan tabel-tabel yang menggambarkan pertanyaan-pertanyaan dari variabel disposisi.

**Tabel 4.16**  
Kesiapan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan kepada karyawan TVRI

Keterangan	Frekuensi	%
Sangat setuju	26	20
Setuju	62	47,7
Kurang setuju	33	25,4
Tidak setuju	6	4,6
Sangat tidak setuju	3	2,3
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 62 responden atau 47,7% responden menjawab setuju. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa disposisi yang dilakukan pemerintah dalam menyampaikan kebijakannya melalui stasiun TVRI dirasakan oleh karyawan TVRI sudah belum terlalu maksimal, hal ini dikarenakan oleh masih adanya karyawan TVRI yang belum memberikan respon yang positif terhadap penyampaian kebijakan yang diberikan aparat pemerintah kepada para karyawan TVRI sehingga diharapkan pada kesempatan yang akan datang pemerintah lebih mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan kerjasama dengan media penyiaran bukan hanya TVRI saja.

**Tabel 4.17**  
**Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan**  
**penyampaian informasi kepada karyawan TVRI**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	13	10
Setuju	90	69,2
Kurang setuju	24	18,5
Tidak setuju	3	2,3
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 90 responden atau 69,2% responden menjawab setuju. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa disposisi yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan penyampaian informasi mengenai kebijakan sudah dirasakan oleh para karyawan TVRI sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima informasi tersebut secara utuh tanpa ada yang ditutup-tutupi oleh pemerintah maupun stasiun TVRI itu sendiri.

**Tabel 4.18**  
**Respon masyarakat atas informasi yang didapat**  
**atas kebijakan yang sedang dijalankan**  
**oleh pemerintah sudah sangat dirasakan**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	11	8,5
Setuju	80	61,5
Kurang setuju	33	25,4
Tidak setuju	5	3,8
Sangat tidak setuju	1	0,8
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 80 responden atau 61,5% responden menjawab setuju. Berdasarkan hasil tersebut karyawan TVRI menganggap bahwa masyarakat sudah dapat memahami atas kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah saat ini, hal ini dapat terlihat dari respon masyarakat setelah melihat tayangan TVRI mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

**Tabel 4.19**  
**Karyawan TVRI sangat terbuka**  
**terhadap informasi baru dari pemerintah**  
**mengenai kebijakan yang dikeluarkan**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	13	10
Setuju	95	73,1
Kurang setuju	21	16,2
Tidak setuju	1	0,8
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 95 responden atau 73,1% responden menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan TVRI sangat terbuka terhadap informasi baru yang disampaikan pemerintah karena karyawan TVRI sebagai implementator kebijakan seharusnya memiliki tingkat



pengetahuan yang lebih sehingga apabila ada masyarakat yang meminta penjelasan secara rinci dari kebijakan yang disosialisasikan oleh stasiun TVRI dapat dijawab dengan tepat dan benar oleh para karyawan TVRI tersebut.

**Tabel 4.20**  
**Peran serta karyawan TVRI dalam mensosialisasikan kebijakan ke masyarakat**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	17	13,1
Setuju	81	62,3
Kurang setuju	26	20
Tidak setuju	4	3,1
Sangat tidak setuju	2	1,5
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 81 responden atau 62,3% responden menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tugas karyawan TVRI ikut andil dalam mensosialisasikan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bukan hanya aparat pemerintah saja yang berkewajiban dalam memberikan sosialisasi tersebut, sehingga diharapkan dari keikutsertaan karyawan TVRI dalam mensosialisasikan kebijakan kepada masyarakat dapat mudah mengerti dan paham mengenai manfaat dari kebijakan tersebut.

**Tabel 4.21**  
**Koordinasi antara pemerintah dengan stasiun TVRI**  
**dalam menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah**

Keterangan	Frekuensi	%
Sangat setuju	17	13,1
Setuju	80	61,5
Kurang setuju	26	20
Tidak setuju	7	5,4
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 80 responden atau 61,5% responden menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan pihak stasiun TVRI sehingga diharapkan bahwa kebijakan yang akan disampaikan ke masyarakat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

**4.2.2.3.4. Hasil Uji Distribusi Frekuensi Variabel Struktur Birokrasi (X<sub>4</sub>)**

Berikut ini disajikan tabel-tabel yang menggambarkan pertanyaan-pertanyaan dari variabel struktur birokrasi.

**Tabel 4.22**  
**Pemerintah bekerjasama dengan pihak stasiun TVRI dalam mensosialisasikan kebijakan yang dijalankan**

Keterangan	Frekuensi	%
Sangat setuju	19	14,6
Setuju	88	67,7
Kurang setuju	20	15,4
Tidak setuju	3	2,3
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 88 responden atau 67,7% responden menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya jalinan kerjasama antara pemerintah dengan pihak stasiun TVRI dalam mensosialisasikan kebijakan yang dijalankan lebih ditingkatkan lagi, hal ini karena tanpa adanya kerjasama yang baik diantara kedua belah pihak, maka sosialisasi kebijakan telah dijalankan tidak dapat tersampaikan secara jelas dan tepat sasaran kepada masyarakat.

**Tabel 4.23**  
**Stasiun TVRI bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	23	17,7
Setuju	81	62,3
Kurang setuju	22	16,9
Tidak setuju	4	3,1
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 81 responden atau 62,3% responden menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jalinan kerjasama antara TVRI dengan pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan lagi dapat proses pemberian sosialisasi kebijakan, agar tidak terjadi ketidaktahuan informasi

mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah kebijakan yang sifatnya nasional, sehingga masyarakat desa maupun masyarakat kota dapat mengetahui kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah.

**Tabel 4.24**  
**Stasiun TVRI memiliki strategi dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui iklan pelayanan masyarakat dengan menggunakan bintang iklan yang familiar**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	15	11,5
Setuju	79	60,8
Kurang setuju	32	24,6
Tidak setuju	4	3,1
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 81 responden atau 62,3% responden menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, stasiun TVRI harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam membuat strategi pembuatan iklan layanan masyarakat, hal ini dapat terlihat dari penggunaan artis yang familiar di layar kaca yang dapat memberikan nilai tambah bagi sebuah tayangan, sehingga diharapkan dari strategi tersebut masyarakat dapat menerima informasi mengenai kebijakan secara jelas dan tepat.

**Tabel 4.25**  
**Stasiun TVRI dalam melakukan penyebaran informasi dengan berbagai strategi, seperti melaksanakan event-event sosialisasi ke masyarakat dengan cara melakukan peliputan khusus**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	20	15,4
Setuju	79	60,8
Kurang setuju	26	20
Tidak setuju	5	3,8
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat positif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 79 responden atau 60,8% responden menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa banyak strategi yang dilakukan TVRI sebagai implementator kebijakan dalam menginformasikan kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara-cara khusus, misalnya seperti melakukan event-event yang berkaitan dengan kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah agar masyarakat luas dapat mengetahui kebijakan apa yang telah dijalankan oleh pemerintah.

#### **4.2.2.3.5. Hasil Uji Distribusi Frekuensi Variabel Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran (Y)**

Berikut ini disajikan tabel-tabel yang menggambarkan pertanyaan-pertanyaan dari variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.

**Tabel 4.26**  
**Media iklan layanan masyarakat yang digunakan untuk mendukung penyebaran informasi ke masyarakat dirasakan sudah efektif dan efisien**

Keterangan	Frekuensi	%
Sangat setuju	5	3,8
Setuju	3	2,3
Kurang setuju	24	18,5
Tidak setuju	78	60
Sangat tidak setuju	20	15,4
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat negatif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 78 responden atau 60% responden menjawab tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan TVRI masih kurang efektif dan efisiennya proses penyebaran informasi kalau pemerintah hanya menggunakan media iklan layanan masyarakat saja dalam menjalankan sosialisasi kebijakan, karyawan TVRI menilai bahwa selain melalui media penyiaran pemerintah seharusnya menggunakan media lain seperti media cetak, dan lain-lain. Sehingga diharapkan dengan menggunakan berbagai media informasi yang disampaikan dapat secara cepat dipahami oleh masyarakat.

**Tabel 4.27**  
**Melalui iklan layanan masyarakat yang disampaikan TVRI memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	2	1,5
Setuju	6	4,6
Kurang setuju	38	29,2
Tidak setuju	72	55,4
Sangat tidak setuju	12	9,2
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat negatif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 72 responden atau 55,4% responden menjawab tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karyawan TVRI menilai bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat tidak terlalu memberikan kesan yang tinggi dihati masyarakat, hal ini disebabkan oleh tidak semua masyarakat memiliki televisi untuk menonton apalagi iklan layanan masyarakat.

**Tabel 4.28**  
**Iklan layanan masyarakat menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	4	3,1
Setuju	7	5,4
Kurang setuju	27	20,8
Tidak setuju	74	56,9
Sangat tidak setuju	18	13,8
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel terlihat bahwa respon dari karyawan TVRI bersifat negatif, hal ini dapat dilihat dari hasil jawaban responden yaitu sebanyak 74 responden atau 56,9% responden menjawab tidak setuju. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa walaupun iklan layanan masyarakat telah menggunakan bahasa yang sederhana, akan tetapi masyarakat masih belum memahami maksud dan tujuan dari iklan tersebut.

**Tabel 4.29**  
**Tingkat pemahaman karyawan TVRI Pusat sangat beragam terhadap kebijakan yang disebarakan melalui iklan layanan masyarakat**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	2	1,5
Setuju	6	4,6
Kurang setuju	33	25,4
Tidak setuju	78	60
Sangat tidak setuju	11	8,5
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 78 (60%) responden menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman karyawan TVRI Pusat yang sangat beragam dalam mengartikan makna iklan layanan masyarakat yang telah ditayangkan di stasiun TVRI mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat beragam pula.



**Tabel 4.30**  
**Iklan layanan masyarakat yang disampaikan**  
**memiliki kesan tersendiri**

<b>Keterangan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	2	1,5
Setuju	10	7,7
Kurang setuju	36	27,7
Tidak setuju	66	50,8
Sangat tidak setuju	16	12,3
Total	130	100

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari tabel tersebut terlihat bahwa 66 (50,8%) responden menjawab tidak setuju. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan TVRI menilai bahwa iklan layanan masyarakat yang telah dibuat tidak memiliki kesan dihati pemirsa, hal ini karena masyarakat biasanya hanya melihat tayangan iklan layanan masyarakat tersebut dalam satu hari hanya sekali, sehingga mengakibatkan iklan tersebut tidak memiliki kesan dihati masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut.

#### **4.2.3. Hasil Uji Asumsi Klasik**

##### **4.2.3.1. Hasil Uji Multikolinearitas**

Umar (2010:325) menyatakan salah satu asumsi model regresi berganda adalah tidak adanya korelasi yang sempurna, atau korelasi tidak sempurna tetapi relatif sangat tinggi, pada variabel-variabel bebasnya (*independent*). Jika, terdapat multikolinieritas sempurna

akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan, serta standar deviasi akan menjadi tak hingga.<sup>51</sup>

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model atau terdapat hubungan yang kuat diantara variabel independen.

Pada Tabel 4.31 ini disajikan hasil uji multikolinearitas.

**Tabel 4.31**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
komunikasi	.927	1.078
sumber daya	.908	1.101
disposisi	.959	1.042
struktur birokrasi	.941	1.063

a. Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Berdasarkan pada tabel terlihat bahwa nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 dan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10, analisis ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linier berganda memenuhi asumsi klasik statistik dan dapat digunakan dalam penelitian.

#### 4.2.3.2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Asumsi ini digunakan apabila variasi dari faktor pengganggu selalu sama pada data pengamatan yang satu terhadap pengamatan

---

<sup>51</sup> Umar, Husein, *Op.Cit*, hal. 325.

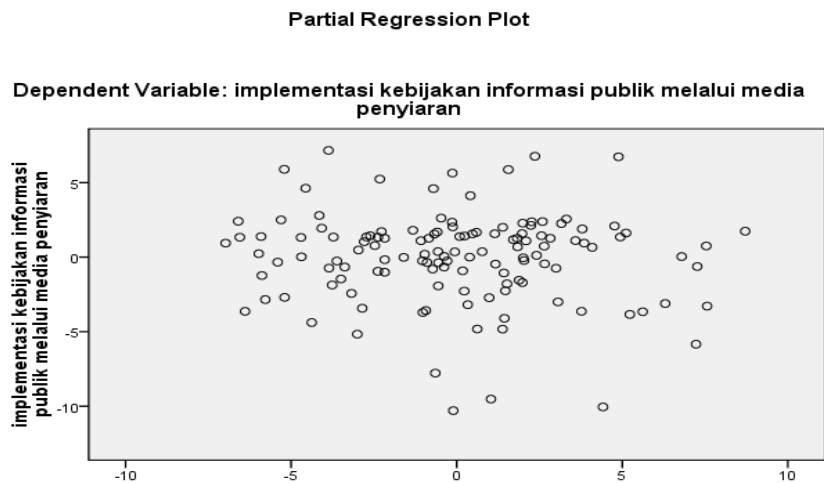
lainnya. Jika ini dapat terpenuhi, berarti variasi faktor pengganggu pada kelompok data tersebut bersifat homoskedastik. Jika asumsi ini tidak dapat dipenuhi maka dapat dikatakan terjadi penyimpangan. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya heteroskedastisitas, terdapat beberapa cara diantaranya adalah (Bhuono, 2005:62): (1) dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu X adalah residunya; (2) dasar analisa, jika ada pola tertentu seperti titik yang membentuk suatu pola yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas secara titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya hal tersebut tersebut terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka hasil *Scatterplot* dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>52</sup> Bhuono, Agung, 2005. *Strategi jitu memilih metode statistik dengan perangkat lunak*. Yogyakarta: Andi, hal. 62.

**Gambar 4.1**  
*Scatterplot*



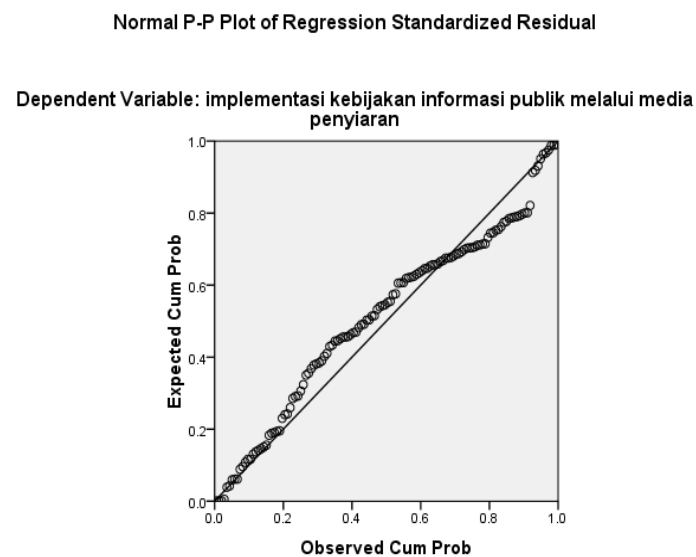
Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

*Output* SPSS pada gambar *Scatterplot* menunjukkan penyebaran titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik tidak berbentuk pola. Berdasarkan hasil analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian. Artinya bahwa gambar tersebut dapat terlihat penyebaran responden dalam menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti tersebar secara merata, karena tidak terlihat responden yang membentuk suatu pola mengumpul atau mengumpul di antara titik  $Y_0$  dan  $X_0$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengujian asumsi klasik ini dapat terpenuhi sehingga peneliti boleh melanjutkan ke penelitian selanjutnya.

#### 4.2.3.3. Hasil Uji Normalitas

Data yang baik dan layak digunakan dalam suatu penelitian adalah data yang terdistribusi dengan normal. Menurut Singgih Santoso (2004:212) ada beberapa cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik P-P plot. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah: (1) jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) jika data menyebar dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Adapun hasil test P-P plot pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Gambar 4.2**  
**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**  
**Dependent Variabel: Implementasi Kebijakan Penyiaran Informasi Melalui**  
**Media Penyiaran (Y)**



Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Dari grafik P-P plot di atas terlihat bahwa sebaran data memusat pada nilai rata-rata dan median atau nilai PP terletak di garis diagonal, maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini memiliki penyebaran dan terdistribusi normal. Dengan normalnya data pada penelitian ini maka penelitian ini dapat diteruskan.

Untuk menegaskan hasil uji normalitas di atas maka peneliti melakukan uji *kolmogorov-smirnov* dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.32**  
***One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test***

		komunikasi	sumber daya	disposisi	struktur birokrasi	implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran
N		130	130	130	130	130
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	19.88	14.81	22.95	15.58	18.54
	Std. Deviation	3.586	2.888	3.093	2.030	3.048
Most Extreme Differences	Absolute	.072	.145	.183	.210	.162
	Positive	.072	.093	.168	.210	.162
	Negative	-.064	-.145	-.183	-.142	-.153
Kolmogorov-Smirnov Z		.818	1.650	2.085	2.392	1.846
Asymp. Sig. (2-tailed)		.514	.203	.347	.149	.219
a. Test distribution is Normal.						

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Berdasarkan hasil uji *kolmogorof-Smirnov* di atas, terlihat nilai *Asymp.Sig* memiliki nilai  $> 0.05$ . Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal dan model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen yaitu implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran berdasarkan masukan variabel independen yaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Maka data penelitian layak digunakan sebagai penelitian.

#### 4.2.4. Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*), yaitu:

##### 4.2.4.1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *adjusted R square*, yang ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4.33**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.837 <sup>a</sup>	.725	.626	3.062	1.971

a. Predictors: (Constant), struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, sumber daya

b. Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Tabel 4.33 menunjukkan nilai R sebesar 0.837 atau 83,7%. Hal ini berarti bahwa hubungan atau korelasi antara komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah kuat karena berada dikisaran 0.70-0.899 (Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro,

2007: 62).<sup>53</sup> Nilai *R Square* sebesar 0.725 atau 72,5%, ini menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran yang dapat dijelaskan oleh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah sebesar 72,5%, sedangkan sisanya sebesar 0,275 atau 27,5% (1-0,725) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. *Standar Error of Estimate* (SEE) sebesar 1,971. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

#### 4.2.4.2. Hasil Uji t

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.34, jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0.05 maka  $H_a$  diterima dan menolak  $H_0$ , sedangkan jika nilai *probability* t lebih besar dari 0.05 maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$ .

**Tabel 4.34**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.651	2.983		6.253	.000		
komunikasi	.077	.078	.091	7.992	.023	.927	1.078
sumber daya	.137	.098	.130	6.398	.003	.908	1.101
disposisi	.038	.089	.039	5.431	.018	.959	1.042
struktur birokrasi	.095	.137	.063	6.694	.001	.941	1.063

a. Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

<sup>53</sup> Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta, hal. 62.



**Hipotesis 1: Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran**

Dari hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.34, dapat terlihat bahwa  $t_{hitung}$  koefisien komunikasi adalah 7,992, sedangkan  $t_{tabel}$  bisa dilihat pada tabel t-test, dengan  $\alpha = 0,05$ , karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari  $t_{tabel}$ , nilai  $\alpha$  dibagi 2 menjadi 0,025 dan  $df = 128$  (didapat dari rumus  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah responden,  $130 - 2 = 128$ ). Didapat  $t_{tabel}$  adalah 1,978.

Variabel komunikasi memiliki nilai *p-value* 0,023 ( $0,023 < 0,05$ ), sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,992 > 1,978$ ) maka hipotesis alternatif pertama ( $H_{a1}$ ) diterima, dan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, berarti secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen komunikasi ( $X_1$ ) terhadap variabel dependen implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran ( $Y$ ).

**Hipotesis 2: Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran**

Dari hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.34, dapat terlihat bahwa  $t_{hitung}$  koefisien sumber daya adalah 6,398, sedangkan  $t_{tabel}$  bisa dilihat pada tabel t-test, dengan  $\alpha = 0,05$ , karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari  $t_{tabel}$ , nilai  $\alpha$

dibagi 2 menjadi 0,025 dan  $df = 128$  (didapat dari rumus  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah responden,  $130 - 2 = 128$ ). Didapat  $t_{tabel}$  adalah 1,978.

Variabel sumber daya memiliki nilai  $p\text{-value}$  0,003 ( $0,003 < 0,05$ ), sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,398 > 1,978$ ) maka hipotesis alternatif kedua ( $H_{a2}$ ) diterima, dan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, berarti secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen sumber daya ( $X_2$ ) terhadap variabel dependen implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran ( $Y$ ).

**Hipotesis 3: Pengaruh Disposisi terhadap Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran**

Dari hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.34, dapat terlihat bahwa  $t_{hitung}$  koefisien disposisi adalah 5,431, sedangkan  $t_{tabel}$  bisa dilihat pada tabel t-test, dengan  $\alpha = 0,05$ , karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari  $t_{tabel}$ , nilai  $\alpha$  dibagi 2 menjadi 0,025 dan  $df = 128$  (didapat dari rumus  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah responden,  $130 - 2 = 128$ ). Didapat  $t_{tabel}$  adalah 1,978.

Variabel disposisi memiliki nilai  $p\text{-value}$  0,018 ( $0,018 < 0,05$ ), sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,431 > 1,978$ ) maka hipotesis alternatif ketiga ( $H_{a3}$ ) diterima, dan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, berarti secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen disposisi ( $X_3$ )

terhadap variabel dependen implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran (Y).

**Hipotesis 4: Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Media Penyiaran**

Dari hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.34, dapat terlihat bahwa  $t_{hitung}$  koefisien struktur birokrasi adalah 6,694, sedangkan  $t_{tabel}$  bisa dilihat pada tabel t-test, dengan  $\alpha = 0,05$ , karena digunakan hipotesis dua arah, ketika mencari  $t_{tabel}$ , nilai  $\alpha$  dibagi 2 menjadi 0,025 dan  $df = 128$  (didapat dari rumus  $n-2$ , dimana  $n$  adalah jumlah responden,  $130 - 2 = 128$ ). Didapat  $t_{tabel}$  adalah 1,978.

Variabel struktur birokrasi memiliki nilai *p-value* 0,001 ( $0,001 < 0,05$ ), sedangkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,694 > 1,978$ ) maka hipotesis alternatif keempat ( $H_{a4}$ ) diterima, dan hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak, berarti secara parsial terdapat pengaruh antara variabel independen struktur birokrasi ( $X_4$ ) terhadap variabel dependen implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran (Y).

**4.2.4.3. Hasil Uji F**

Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen maka digunakan uji F, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.35**  
**Hasil Uji F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.380	4	116.595	12.437	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1171.928	125	9.375		
	Total	1198.308	129			

a. Predictors: (Constant), struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, sumber daya

b. Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran

Sumber: Data primer yang diolah penulis, 2013

Berdasarkan tabel 4.35 di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai probabilitas (*p-value*) 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ), ini berarti bahwa variabel independen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran.

#### **4.3. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal dalam tesis ini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan menurut Edward III adalah komunikasi, sumber-sumber, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat dimensi ini dalam konteks kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran yang dilakukan oleh stasiun TVRI nampak ada kesesuaian, walaupun derajat kepentingan masing-masing dimensi tidak segaris.

##### **1. Pengaruh Komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran**

Dimensi komunikasi yang memiliki nilai negatif menunjukkan bahwa di dalam proses menyampaikan informasi seorang narasumber dituntut untuk memahami karakter dari orang yang akan diberikan informasi, dalam hal penyampaian informasi kepada karyawan TVRI, pemerintah sebagai regulator harus menunjuk orang yang tepat agar kebijakan yang ingin dipublikasikan ke masyarakat melalui media penyiaran, dalam hal ini karyawan TVRI sebagai implementatornya harus terlebih dahulu diberikan penjelasan secara mendetail tentang informasi yang akan disampaikan kepada publik. Masih kurangnya tingkat kepercayaan yang diberikan karyawan TVRI kepada pemerintah apabila pemerintah menyampaikan isi pesan dalam iklan layanan masyarakat yang akan diberikan kepada masyarakat, hal ini karena karyawan TVRI menganggap bahwa isi pesan tersebut menggunakan bahasa yang baku, arti karyawan merasa kalau isi pesan tersebut disampaikan kepada masyarakat luas tidak semuanya paham akan pesan kebijakan yang disampaikan. Dirasakan kurang oleh para karyawan TVRI karena informasi yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh karyawan TVRI tersebut masih kurang relevan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal tersebut disebabkan oleh informasi yang telah disampaikan aparat pemerintah yang kurang sesuai dengan kebijakan yang seharusnya disampaikan. Masyarakat merasa masih kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui media penyiaran, hal ini karena tidak

semua masyarakat memiliki televisi untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui media penyiaran. Dan materi iklan layanan masyarakat yang akan dibuat belum sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah karena masih terjadinya perbedaan persepsi antara karyawan TVRI dengan pemerintah dalam membuat iklan layanan masyarakat. Hal ini yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh masyarakat luas sehingga diharapkan materi iklan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat.

Dimensi komunikasi amat menentukan dalam berhasilnya suatu program kebijakan yang disampaikan dari pemerintah sebagai regulator kemudian TVRI sebagai implementator sangat dibutuhkan karena dengan komunikasi yang baik, akibat komunikasi yang ditimbulkan juga akan berbuah baik, oleh karena itu penyampaian pesan merupakan hal yang mutlak harus diperhatikan, hal ini sejalan dengan pendapat Edward III yang menjelaskan persyaratan utama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa para pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah TVRI harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan kebijakan harus disalurkan (*transmission*) kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat diterima oleh para pelaksana, kemudian jika kebijakan akan diterapkan, maka perintah kebijakan harus diterima dengan jelas (*Clarity*) selain itu perintah kebijakan harus konsisten (*Consistency*). Realitas di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi

yang baik belum dilakukan secara maksimal, yang hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya karyawan TVRI sebagai implementator kebijakan masih kurang mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan tepat sasaran.

## **2. Pengaruh Sumber Daya terhadap Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran**

Dalam konteks kebijakan publik, sumber daya manusia dan dana juga memiliki peran yang amat menentukan, karena dengan sumber daya dan sumber dana yang memadai dan berkualitas. Kebijakan akan dapat dikomunikasikan kepada sasaran penerima kebijakan dengan baik pula, sebaliknya juga, sebagaimana realitas yang ada dalam kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran ini meskipun pendanaan sudah tidak menjadi persoalan, karena ditopang dari APBN dan APBD, namun nampak sekali bahwa sumber daya manusia yang dimiliki kurang memadai bagi dari sisi pendidikan, peningkatan kualitas serta dana yang tersedia, sehingga hasil kebijakannyapun kurang maksimal. Dari sisi ini pula koordinasi antar pemerintah dan stasiun TVRI kurang dilakukan secara maksimal untuk dapat menghilangkan rumor menjadi kesan yang positif dan menyenangkan.

## **3. Pengaruh Disposisi terhadap Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran**

Disposisi mencakup (1) respons implementator terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kebijakan, (2)

kognisi, pemahaman para implementator terhadap kebijakan yang dilaksanakan, (3) intensitas disposisi implementator, yakni freferensi nilai yang dimiliki oleh implementator. Fenomena realitas kebijakan di lapangan menunjukkan hal yang kurang mendukung, hal ini nampaknya juga disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki implementator.

Dimensi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran masih bersifat negatif, hal ini karena karyawan TVRI masih menilai kurang efektif dan efisiennya proses penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah kalau hanya menggunakan media iklan layanan masyarakat saja dalam menjalankan sosialisasi kebijakan, karyawan TVRI menilai bahwa selain melalui media penyiaran pemerintah seharusnya menggunakan media lain seperti media cetak, dan lain-lain. Sehingga diharapkan dengan menggunakan berbagai media informasi yang disampaikan dapat secara cepat dipahami oleh masyarakat. Karyawan TVRI menilai bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat tidak terlalu memberikan kesan yang tinggi dihati masyarakat, hal ini disebabkan oleh tidak semua masyarakat memiliki televisi untuk menonton apalagi iklan layanan masyarakat. Walaupun iklan layanan masyarakat telah menggunakan bahasa yang sederhana, akan tetapi masyarakat masih belum memahami maksud dan tujuan dari iklan tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat yang sangat beragam



dalam mengartikan makna iklan layanan masyarakat yang telah ditayangkan di stasiun TVRI mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat beragam pula. Karyawan TVRI menilai bahwa iklan layanan masyarakat yang telah dibuat tidak memiliki kesan dihati pemirsa, hal ini karena masyarakat biasanya hanya melihat tayangan iklan layanan masyarakat tersebut dalam satu hari hanya sekali, sehingga mengakibatkan iklan tersebut tidak memiliki kesan dihati masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut.

#### **4. Pengaruh Struktur Birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Melalui Media Penyiaran**

Kultur birokrasi di Indonesia yang nuansanya cenderung *top-down*, budaya minta petunjuk dan arahan dari atasan, serta kecenderungan yang ABS (asal bapak senang), ketika ada atasan pura-pura rajin, dan sebaliknya ketika atasan hilang kerjanya pun malas, dijumpai juga pada kebijakan penyebaran informasi melalui media penyiaran di wilayah penelitian. Kondisi demikian dirasakan betul oleh penanggung jawab program di TVRI, namun demikian karena suatu program sudah sangat melembaga serta ketergantungan penerima program terhadap birokrasi semakin berkurang, sehingga kebijakan tetap bisa berjalan dengan baik, sisi lain yang cukup menghambat terhadap penyebaran informasi kebijakan kepada masyarakat melalui TVRI juga diakibatkan karena sikap karyawan TVRI yang sudah merasa bisa tanpa harus menambah wawasan baru mengenai kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sesuai hasil pembahasan dalam bab IV, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran secara berurutan dari yang paling dominan adalah sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi. Sehingga kesimpulan ini sesuai dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Arifin Tahir ( 2011 ) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya proses implementasi kebijakan adalah sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi dan disposisi. Hal ini karena terdapat pengaruh yang positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
2. Anita Yurnalia ( 2010 ) yang menyatakan bahwa baik secara parsial maupun simultan factor-faktor komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi berpengaruh secara positif terhadap implementasi kebijakan.
3. Eko Slamet Riyanto ( 2010 ) yang menyatakan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hal ini karena komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, beberapa masukan yang penting untuk diperhatikan adalah:

### 1. Sumber daya

Sumber daya yang berpotensi di perlukan karna dapat memberi dukungan mengenai kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, sumber daya yang di perlukan adalah yang mempunyai keahlian atau yang mampu dalam bidangnya, sehingga dapat melakukan koordinasi yang baik dan komunikasi secara detail terhadap informasi yang akan di sampaikan.

### 2. Komunikasi

Proses Komunikasi kebijakan berdasarkan mekanisme yang baik yaitu, kejelasan komunikasi ( informasi yang akan di sampaikan ), konsistensi komunikasi, media penyebaran informasi, konten informasi dan kemasan informasi. Hal ini sangat di perlukan agar informasi yang akan di sampaikan tepat sasaran dan dapat di pahami secara baik.

### 3. Struktur birokrasi

Dalam hal ini perlu di pahami bahwa pendekatan secara struktur birokrasi antara regulator dan implementator sangat di perlukan, agar terjadi satu pemahaman kepentingan sehingga dapat tercapainya hasil secara maksimal. Sebagai contoh apabila terjadi ketidakcocokan anggaran dengan program yang akan di sampaikan maka hal ini dapat diselesaikan secara struktur birokrasi.

### 4. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media penyiaran, jika kita ingin berhasil secara efektif dan efisien, implementator diwajibkan tidak hanya mengetahui apa yang harus di lakukan tetapi juga mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut dan mengimplementasikannya secara leluasa. Karena hal ini menyangkut komitmen implementator terhadap kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah sebagai sebuah komitmen pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala. 2009. *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Aripin, Sofjan dan Ayi Karyana. 2009. *Implementasi Pelayanan Publik (Kebijakan, Kompetensi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Strategi)*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 8, No. 1 Oktober 2009.
- Bhuono, Agung, 2005. *Strategi jitu memilih metode statistik dengan perangkat lunak*. Yogyakarta: Andi.
- Dunn, W, 2000. *Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan Wibawa S., dkk)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, R.N. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Tenth Edition Prentice-Hall.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Fisher, B. Aubrey. 2007. *Teori-Teori Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi Empat. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Irawan, P. 2003. *Logika dan Prosedur Penelitian*, 5 rd ed, Jakarta: STIA\_LAN Press.
- Islamy, I., 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, M. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Mukhtar H., 2009. *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, R, 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pareno, Sam Abede. 2005. *Media Massa antara Realitas dan Mimpi*. Surabaya: Papyrus.
- Riduwan dan Engkos Achmad Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Riyanto, Mochamad. 2010. *Latar Belakang dan Arah Revisi UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samodra, et.al. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Santoso, Singgih, 2004. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kaulitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraa Pemerintahan di Kota Gorontalo*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.
- Umar, Husein. 2008. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Umar, Husein, 2010. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.

Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

## Lampiran 1: Kuesioner Penelitian

A. Isilah keterangan dibawah ini atau beri tanda centang / *check list* (V) pada pertanyaan pilihan.

### Karakteristik Responden

1. Nama : ..... (Boleh tidak diisi)
2. Umur : ..... Tahun
3. Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan
4. Pendidikan :  
 SMU  
 Diploma (sebutkan:  D1    D2    D3)  
 Strata Satu (S1)  
 Strata Dua (S2)  
 Lain-lain, sebutkan .....
5. Status :  Kawin       Belum Kawin

### B. Cara Pengisian kuesioner

Silahkan anda pilih jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi yang ada dengan jalan memberikan tanda (X) pada pilihan jawaban yang tersedia.

Kriteria Jawaban Responden	Point
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Kurang Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5



## Komunikasi (X<sub>1</sub>)

1. Karyawan TVRI memahami penjelasan narasumber tentang informasi yang disampaikan?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
2. Isi pesan yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat memiliki kesan?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
3. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat melalui iklan layanan masyarakat di stasiun televisi TVRI sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
4. Media penyebaran informasi yang disampaikan melalui iklan layanan masyarakat sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
5. Materi dari informasi yang disampaikan melalui media penyiaran ini sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
6. Kemasan iklan yang dibuat sangat menarik perhatian?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju

### Sumber Daya (X<sub>2</sub>)

1. Kesiapan penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah dan pihak media penyiaran?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
2. Kesiapan karyawan TVRI baik di pusat maupun daerah dalam menyampaikan kebijakan melalui media penyiaran baik itu penyiaran yang ada di pusat maupun daerah?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
3. Penyebaran informasi publik mengenai kebijakan pemerintah telah dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media penyiaran?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
4. Bintang iklan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan publik adalah artis atau tokoh yang dapat menyakinkan masyarakat?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju

### Disposisi (X<sub>3</sub>)

1. Kesiapan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan kepada karyawan TVRI?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
2. Kemampuan pemerintah dalam melaksanakan penyampaian informasi kepada karyawan TVRI?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju

- c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
3. Respon karyawan TVRI Pusat atas informasi yang didapat atas kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah sudah sangat dirasakan?
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Tidak setuju
    - e. Sangat tidak setuju
  4. Karyawan TVRI sangat terbuka terhadap informasi baru dari pemerintah mengenai kebijakan yang dikeluarkan?
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Tidak setuju
    - e. Sangat tidak setuju
  5. Peran serta karyawan TVRI dalam mensosialisasikan kebijakan ke masyarakat?
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Tidak setuju
    - e. Sangat tidak setuju
  6. Koordinasi antara pemerintah dengan stasiun TVRI dalam menjalankan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah?
    - a. Sangat setuju
    - b. Setuju
    - c. Kurang setuju
    - d. Tidak setuju
    - e. Sangat tidak setuju

#### Struktur Birokrasi (X<sub>4</sub>)

1. Pemerintah bekerjasama dengan pihak stasiun TVRI dalam mensosialisasikan kebijakan yang dijalankan?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
2. Stasiun TVRI bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju

- e. Sangat tidak setuju
- 3. Stasiun TVRI memiliki strategi dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui iklan pelayanan masyarakat dengan menggunakan bintang iklan yang familiar?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
- 4. Stasiun TVRI dalam melakukan penyebaran informasi dengan berbagai strategi, seperti melaksanakan event-event sosialisasi ke masyarakat dengan cara melakukan peliputan khusus?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju

Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi melalui media penyiaran (Y)

- 1. Media iklan layanan masyarakat yang digunakan untuk mendukung penyebaran informasi ke masyarakat dirasakan sudah efektif dan efisien?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
- 2. Melalui iklan layanan masyarakat yang disampaikan TVRI memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
- 3. Iklan layanan masyarakat menggunakan bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju

4. Tingkat pemahaman karyawan TVRI Pusat sangat beragam terhadap kebijakan yang disebarakan melalui iklan layanan masyarakat?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju
5. Iklan layanan masyarakat yang disampaikan memiliki kesan tersendiri?
  - a. Sangat setuju
  - b. Setuju
  - c. Kurang setuju
  - d. Tidak setuju
  - e. Sangat tidak setuju

Lampiran 2: Jawaban Karakteristik Responden

Responden	JenisKelamin	Responden	JenisKelamin	Responden	JenisKelamin	Responden	JenisKelamin
1	1	36	2	71	2	106	2
2	1	37	2	72	1	107	2
3	1	38	2	73	1	108	2
4	1	39	2	74	1	109	2
5	1	40	2	75	1	110	2
6	1	41	2	76	1	111	1
7	1	42	2	77	1	112	1
8	1	43	2	78	1	113	1
9	1	44	2	79	2	114	1
10	1	45	1	80	2	115	1
11	1	46	1	81	2	116	1
12	2	47	1	82	2	117	1
13	2	48	1	83	2	118	1
14	2	49	1	84	2	119	1
15	2	50	1	85	2	120	1
16	2	51	1	86	2	121	1
17	2	52	1	87	2	122	1
18	2	53	1	88	2	123	1
19	2	54	1	89	1	124	2
20	2	55	1	90	1	125	2
21	2	56	1	91	1	126	2
22	1	57	1	92	1	127	2
23	1	58	1	93	1	128	1
24	1	59	1	94	1	129	1
25	1	60	2	95	1	130	1
26	1	61	2	96	1		
27	1	62	2	97	1		
28	1	63	2	98	1		
29	1	64	2	99	2		
30	2	65	2	100	2		
31	2	66	2	101	2		
32	2	67	2	102	2		
33	2	68	2	103	2		
34	2	69	2	104	2		
35	2	70	2	105	2		

Responden	Pendidikan	Responden	Pendidikan	Responden	Pendidikan	Responden	Pendidikan
1	1	36	3	71	3	106	3
2	1	37	3	72	3	107	3
3	2	38	3	73	3	108	3
4	2	39	2	74	3	109	3
5	2	40	2	75	4	110	3
6	2	41	2	76	4	111	3
7	2	42	2	77	4	112	3
8	2	43	2	78	4	113	3
9	2	44	2	79	4	114	3
10	3	45	2	80	4	115	3
11	3	46	2	81	4	116	2
12	3	47	2	82	2	117	2
13	3	48	3	83	2	118	2
14	3	49	3	84	2	119	2
15	3	50	3	85	2	120	2
16	3	51	3	86	2	121	2
17	3	52	3	87	3	122	2
18	3	53	3	88	3	123	2
19	3	54	3	89	3	124	3
20	3	55	3	90	3	125	3
21	3	56	3	91	3	126	3
22	2	57	3	92	3	127	3
23	2	58	3	93	3	128	3
24	2	59	3	94	3	129	3
25	2	60	3	95	3	130	3
26	2	61	3	96	3		
27	2	62	2	97	3		
28	3	63	2	98	3		
29	3	64	2	99	3		
30	3	65	2	100	3		
31	3	66	2	101	3		
32	3	67	2	102	3		
33	3	68	2	103	3		
34	3	69	3	104	3		
35	3	70	3	105	3		

Responden	Status	Responden	Status	Responden	Status	Responden	Status
1	1	36	2	71	1	106	1
2	1	37	2	72	1	107	1
3	1	38	2	73	2	108	1
4	1	39	2	74	2	109	1
5	1	40	2	75	2	110	2
6	2	41	2	76	2	111	2
7	2	42	2	77	2	112	2
8	2	43	2	78	2	113	2
9	2	44	2	79	2	114	2
10	2	45	2	80	2	115	2
11	2	46	1	81	2	116	2
12	2	47	1	82	2	117	2
13	2	48	1	83	2	118	2
14	2	49	1	84	2	119	2
15	2	50	1	85	2	120	2
16	2	51	1	86	2	121	2
17	2	52	1	87	2	122	1
18	2	53	1	88	2	123	1
19	2	54	1	89	2	124	1
20	2	55	1	90	2	125	1
21	1	56	1	91	1	126	1
22	1	57	2	92	1	127	1
23	1	58	2	93	1	128	1
24	1	59	2	94	1	129	1
25	1	60	2	95	1	130	1
26	1	61	1	96	1		
27	1	62	1	97	1		
28	1	63	1	98	1		
29	2	64	1	99	1		
30	2	65	1	100	1		
31	2	66	1	101	1		
32	2	67	1	102	1		
33	2	68	1	103	1		
34	2	69	1	104	1		
35	2	70	1	105	1		



Lampiran 3: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Komunikasi ( $X_1$ )

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	item6	TotalItem
1	4	4	4	4	3	4	23
2	5	5	5	4	5	3	27
3	4	4	3	3	4	4	22
4	3	3	4	3	4	5	22
5	3	4	3	4	3	3	20
6	5	4	4	5	4	4	26
7	3	4	3	4	3	4	21
8	3	4	4	4	4	5	24
9	3	4	4	4	4	4	23
10	4	4	3	4	4	5	24
11	5	4	4	5	5	4	27
12	4	4	4	4	5	5	26
13	4	4	4	3	4	3	22
14	4	4	4	4	3	3	22
15	2	2	2	4	2	4	16
16	3	3	3	4	4	3	20
17	3	2	2	2	1	3	13
18	5	3	4	4	3	4	23
19	2	2	2	3	2	3	14
20	3	4	4	4	4	4	23
21	3	3	3	2	3	4	18
22	3	3	2	3	2	3	16
23	3	3	2	4	3	4	19
24	4	3	2	4	3	4	20
25	5	4	3	2	1	4	19
26	4	4	4	4	3	5	24
27	3	2	3	2	3	4	17
28	4	3	4	3	3	3	20
29	3	4	4	4	4	4	23
30	3	3	3	2	3	4	18
31	4	5	5	5	5	4	28
32	4	4	4	3	3	5	23
33	3	3	3	4	3	4	20
34	5	5	2	2	4	3	21
35	2	2	2	3	2	3	14
36	5	4	3	2	1	4	19

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	item6	TotalItem
37	4	2	3	3	3	4	19
38	3	3	3	3	3	4	19
39	3	3	1	3	2	2	14
40	3	2	2	2	3	3	15
41	4	3	3	3	3	3	19
42	2	2	2	1	3	4	14
43	2	2	3	1	2	5	15
44	4	3	2	3	4	4	20
45	4	3	3	3	3	2	18
46	4	3	3	3	3	5	21
47	3	3	3	3	3	2	17
48	2	4	1	3	4	4	18
49	4	3	4	3	4	4	22
50	5	5	5	3	3	4	25
51	5	3	4	3	2	4	21
52	5	2	2	4	3	3	19
53	2	2	2	3	3	4	16
54	2	2	2	2	2	4	14
55	3	2	3	2	3	4	17
56	4	4	2	3	3	4	20
57	3	2	4	2	2	4	17
58	3	4	2	2	3	4	18
59	2	3	2	2	2	4	15
60	5	2	2	3	3	4	19
61	4	4	4	4	3	4	23
62	5	5	5	4	5	3	27
63	4	4	3	3	4	4	22
64	3	3	4	3	4	5	22
65	3	4	3	4	3	3	20
66	5	4	4	5	4	4	26
67	3	4	3	4	3	4	21
68	3	4	4	4	4	5	24
69	3	4	4	4	4	4	23
70	4	4	3	4	4	5	24
71	5	4	4	5	5	4	27
72	4	4	4	4	5	5	26
73	4	4	4	3	4	3	22
74	4	4	4	4	3	3	22

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	item6	TotalItem
75	2	2	2	4	2	4	16
76	3	3	3	4	4	3	20
77	3	2	2	2	1	3	13
78	5	3	4	4	3	4	23
79	2	2	2	3	2	3	14
80	3	4	4	4	4	4	23
81	3	3	3	2	3	4	18
82	3	3	2	3	2	3	16
83	3	3	2	4	3	4	19
84	4	3	2	4	3	4	20
85	5	4	3	2	1	4	19
86	4	4	4	4	3	5	24
87	3	2	3	2	3	4	17
88	4	3	4	3	3	3	20
89	3	4	4	4	4	4	23
90	3	3	3	2	3	4	18
91	4	5	5	5	5	4	28
92	4	4	4	3	3	5	23
93	3	3	3	4	3	4	20
94	5	5	2	2	4	3	21
95	2	2	2	3	2	3	14
96	5	4	3	2	1	4	19
97	4	2	3	3	3	4	19
98	3	3	3	3	3	4	19
99	3	3	1	3	2	2	14
100	3	2	2	2	3	3	15
101	4	3	3	3	3	3	19
102	2	2	2	1	3	4	14
103	2	2	3	1	2	5	15
104	4	3	2	3	4	4	20
105	4	3	3	3	3	2	18
106	4	3	3	3	3	5	21
107	3	3	3	3	3	2	17
108	2	4	1	3	4	4	18
109	4	3	4	3	4	4	22
110	5	5	5	3	3	4	25
111	5	3	4	3	2	4	21
112	5	2	2	4	3	3	19

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	item6	TotalItem
113	2	2	2	3	3	4	16
114	2	2	2	2	2	4	14
115	3	2	3	2	3	4	17
116	4	4	2	3	3	4	20
117	3	2	4	2	2	4	17
118	3	4	2	2	3	4	18
119	2	3	2	2	2	4	15
120	5	2	2	3	3	4	19
121	3	2	3	3	3	5	19
122	4	3	4	3	3	4	21
123	4	3	3	4	4	3	21
124	5	4	3	3	4	4	23
125	2	2	3	3	3	4	17
126	4	3	3	3	4	3	20
127	4	3	2	2	2	4	17
128	4	3	3	3	4	5	22
129	4	2	4	4	4	5	23
130	4	4	4	4	4	4	24

Lampiran 4: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Sumber Daya ( $X_2$ )

Responden	item1	item2	item3	item4	TotalItem
1	4	4	4	3	15
2	4	3	3	4	14
3	4	4	3	3	14
4	5	5	5	5	20
5	3	3	3	3	12
6	4	4	4	1	13
7	4	4	4	5	17
8	5	5	5	1	16
9	4	5	4	4	17
10	5	4	5	5	19
11	4	3	3	4	14
12	5	4	5	5	19
13	1	3	1	3	8
14	3	3	4	4	14
15	4	4	5	4	17
16	3	3	3	4	13
17	4	4	4	5	17
18	5	5	3	5	18
19	4	4	4	5	17
20	4	4	4	5	17
21	4	4	4	5	17
22	4	3	4	4	15
23	3	4	4	5	16
24	4	2	4	4	14
25	4	4	4	5	17
26	5	5	4	5	19
27	4	4	4	3	15
28	4	3	4	4	15
29	4	4	4	4	16
30	4	4	4	4	16
31	4	4	4	4	16
32	5	5	5	5	20
33	4	4	4	5	17
34	3	3	4	5	15
35	4	3	4	4	15
36	4	4	4	4	16

Responden	item1	item2	item3	item4	TotalItem
37	4	4	4	4	16
38	4	4	4	4	16
39	3	4	3	4	14
40	3	3	3	4	13
41	3	3	4	4	14
42	4	4	3	3	14
43	5	5	3	4	17
44	4	4	5	4	17
45	4	2	3	2	11
46	5	5	5	5	20
47	1	1	1	2	5
48	4	4	4	4	16
49	4	4	3	3	14
50	4	4	4	3	15
51	4	4	3	3	14
52	3	4	4	2	13
53	4	4	4	4	16
54	4	4	4	5	17
55	4	4	4	4	16
56	4	4	4	4	16
57	5	4	4	5	18
58	4	4	4	3	15
59	4	4	4	4	16
60	4	4	4	4	16
61	5	5	5	5	20
62	4	4	4	4	16
63	3	4	4	3	14
64	3	3	4	5	15
65	4	4	4	3	15
66	4	4	4	4	16
67	4	4	4	5	17
68	5	5	4	5	19
69	5	5	5	5	20
70	4	3	4	5	16
71	3	4	4	2	13
72	4	4	4	4	16
73	4	4	4	5	17
74	4	4	4	4	16

Responden	item1	item2	item3	item4	TotalItem
75	4	4	4	4	16
76	5	4	4	5	18
77	4	4	4	3	15
78	4	4	4	4	16
79	4	4	4	4	16
80	5	5	5	5	20
81	3	3	3	2	11
82	2	2	1	3	8
83	2	3	1	3	9
84	3	2	3	4	12
85	3	3	3	2	11
86	3	3	3	3	12
87	3	3	3	3	12
88	4	1	3	3	11
89	3	4	3	2	12
90	5	5	3	4	17
91	3	4	3	3	13
92	2	2	4	3	11
93	2	2	3	2	9
94	2	2	2	2	8
95	2	3	2	3	10
96	4	2	3	2	11
97	2	4	2	4	12
98	4	2	2	4	12
99	3	2	2	2	9
100	2	2	3	3	10
101	4	4	3	3	14
102	4	3	5	3	15
103	4	4	4	4	16
104	5	5	4	5	19
105	3	3	3	3	12
106	4	4	4	4	16
107	4	4	3	2	13
108	5	5	4	4	18
109	4	4	4	4	16
110	5	5	4	4	18
111	4	4	5	3	16
112	5	5	5	4	19

Responden	item1	item2	item3	item4	TotalItem
113	1	3	4	2	10
114	3	3	3	2	11
115	4	4	2	4	14
116	3	3	4	3	13
117	4	3	1	4	12
118	5	4	3	4	16
119	4	3	2	2	11
120	4	4	4	2	14
121	4	4	3	2	13
122	4	5	4	4	17
123	3	4	3	3	13
124	4	5	4	4	17
125	4	3	4	4	15
126	5	3	3	4	15
127	4	4	4	4	16
128	4	3	4	4	15
129	4	3	4	4	15
130	4	4	4	4	16



Lampiran 5: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Disposisi ( $X_3$ )

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	item6	TotalItem
1	4	4	4	4	4	4	24
2	4	4	4	4	4	4	24
3	4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	4	5	5	5	29
5	3	3	3	4	3	3	19
6	4	4	4	4	4	4	24
7	4	4	4	4	4	4	24
8	1	4	5	5	4	4	23
9	3	3	3	4	3	3	19
10	5	5	4	4	5	5	28
11	3	4	3	3	4	4	21
12	4	4	4	4	4	4	24
13	3	4	3	3	4	4	21
14	4	4	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	4	4	4	4	4	24
17	2	3	3	3	3	3	17
18	3	4	4	4	4	4	23
19	4	5	4	4	5	5	27
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	4	4	4	3	4	23
22	5	5	5	4	5	5	29
23	4	4	3	3	4	4	22
24	3	3	4	3	4	3	20
25	3	4	3	4	3	4	21
26	5	4	4	5	4	4	26
27	3	4	3	4	3	4	21
28	3	4	4	4	4	4	23
29	3	4	4	4	4	4	23
30	4	4	3	4	4	4	23
31	5	4	4	5	5	4	27
32	4	4	4	4	5	4	25
33	4	4	4	3	4	4	23
34	4	4	4	4	3	4	23
35	2	2	2	4	2	2	14
36	3	3	3	4	4	3	20

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	item6	TotalItem
37	3	2	2	2	1	2	12
38	5	3	4	4	3	3	22
39	2	2	2	3	2	2	13
40	3	4	4	4	4	4	23
41	3	3	3	4	3	3	19
42	5	5	4	4	5	5	28
43	3	4	3	3	4	4	21
44	4	4	4	4	4	4	24
45	3	4	3	3	4	4	21
46	4	4	4	4	4	4	24
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	2	3	3	3	3	3	17
50	4	4	4	4	4	4	24
51	4	4	4	4	4	4	24
52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	5	4	5	5	5	29
54	3	3	3	4	3	3	19
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	1	4	5	5	4	4	23
58	3	3	3	4	3	3	19
59	5	5	4	4	5	5	28
60	3	4	3	3	4	4	21
61	3	4	3	3	4	4	21
62	4	4	4	4	4	4	24
63	3	4	3	3	4	4	21
64	4	4	4	4	4	4	24
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24
67	2	3	3	3	3	3	17
68	4	4	4	4	4	4	24
69	4	4	4	4	4	4	24
70	4	4	4	4	4	4	24
71	4	4	4	4	3	4	23
72	5	5	5	4	5	3	27
73	4	4	3	3	4	4	22
74	3	3	4	3	4	5	22

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	item6	TotalItem
75	3	4	3	4	3	3	20
76	5	4	4	5	4	4	26
77	3	4	3	4	3	4	21
78	3	4	4	4	4	5	24
79	3	4	4	4	4	4	23
80	4	4	3	4	4	5	24
81	4	4	4	4	3	4	23
82	4	4	4	4	5	5	26
83	4	4	4	4	4	3	23
84	5	5	5	5	4	3	27
85	3	4	3	4	3	4	21
86	4	4	4	4	4	3	23
87	4	4	4	4	3	4	23
88	1	5	1	5	4	5	21
89	3	4	3	4	4	4	22
90	5	4	5	4	4	4	26
91	3	3	3	3	5	5	22
92	4	4	4	4	5	4	25
93	3	3	3	3	4	4	20
94	4	4	4	4	3	4	23
95	4	4	4	4	2	2	20
96	4	4	4	4	4	3	23
97	2	3	2	3	1	2	13
98	3	4	3	4	3	3	20
99	4	4	4	4	2	2	20
100	4	4	4	4	4	4	24
101	4	3	3	4	4	4	22
102	4	4	3	4	4	4	23
103	4	4	4	4	4	3	23
104	3	4	3	3	4	4	21
105	4	4	4	4	4	4	24
106	4	4	4	4	4	3	23
107	5	3	4	4	5	5	26
108	4	3	4	4	4	3	22
109	4	4	4	4	4	3	23
110	3	3	2	3	3	2	16
111	4	4	4	4	3	4	23
112	4	4	4	4	4	4	24

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	item6	TotalItem
113	5	4	4	4	4	3	24
114	5	4	4	4	4	4	25
115	4	4	4	4	4	4	24
116	5	3	5	5	4	4	26
117	4	3	5	4	5	4	25
118	5	3	4	4	4	4	24
119	5	4	4	4	4	4	25
120	5	4	4	4	3	3	23
121	4	3	4	4	4	3	22
122	4	4	4	4	4	4	24
123	5	5	4	4	4	4	26
124	5	5	5	5	4	5	29
125	5	4	3	4	3	4	23
126	5	4	5	5	5	3	27
127	4	4	4	4	3	5	24
128	4	3	4	4	4	4	23
129	5	5	5	5	5	5	30
130	5	4	4	4	4	4	25

Lampiran 6: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Struktur Birokrasi (X<sub>4</sub>)

Responden	item1	item2	item3	item4	TotalItem
1	4	4	3	3	14
2	4	3	3	4	14
3	4	5	5	4	18
4	4	4	3	4	15
5	4	4	4	4	16
6	5	5	4	4	18
7	5	4	5	4	18
8	4	4	4	4	16
9	4	4	3	4	15
10	5	5	5	5	20
11	4	5	4	4	17
12	4	5	4	4	17
13	4	4	2	2	12
14	4	4	3	3	14
15	4	5	4	4	17
16	5	5	5	5	20
17	4	4	4	4	16
18	4	2	5	5	16
19	4	2	4	4	14
20	4	4	4	3	15
21	4	4	3	3	14
22	4	3	3	3	13
23	4	4	3	3	14
24	3	4	3	2	12
25	4	4	3	3	14
26	4	3	3	4	14
27	4	4	4	3	15
28	4	3	4	4	15
29	4	3	4	4	15
30	3	4	4	4	15
31	3	4	4	4	15
32	4	4	4	3	15
33	3	3	4	4	14
34	4	4	4	4	16
35	4	4	4	3	15
36	4	4	5	5	18

Responden	item1	item2	item3	item4	TotalItem
37	4	4	4	3	15
38	4	4	4	3	15
39	2	3	3	2	10
40	4	4	3	4	15
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	3	15
43	4	4	4	4	16
44	4	4	4	4	16
45	5	5	4	4	18
46	5	4	5	4	18
47	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16
49	4	4	3	3	14
50	4	4	4	3	15
51	4	4	4	4	16
52	4	4	4	4	16
53	5	5	4	5	19
54	3	4	3	4	14
55	5	5	5	3	18
56	4	4	3	5	16
57	4	4	4	4	16
58	5	5	5	5	20
59	4	4	4	4	16
60	4	4	4	4	16
61	4	4	4	4	16
62	3	3	3	4	13
63	4	4	4	3	15
64	4	4	4	4	16
65	4	4	3	4	15
66	4	4	4	4	16
67	3	4	3	4	14
68	5	5	5	5	20
69	5	5	4	5	19
70	3	3	3	3	12
71	4	4	4	4	16
72	4	4	4	3	15
73	3	5	4	3	15
74	3	3	3	4	13

Responden	item1	item2	item3	item4	TotalItem
75	4	4	4	3	15
76	4	4	2	3	13
77	3	4	3	4	14
78	4	4	4	5	17
79	3	2	3	2	10
80	4	4	4	4	16
81	3	3	3	3	12
82	4	2	3	2	11
83	4	4	4	4	16
84	4	3	4	5	16
85	4	4	4	4	16
86	4	4	4	3	15
87	4	4	4	4	16
88	4	4	4	4	16
89	3	4	3	4	14
90	5	5	5	5	20
91	4	4	4	4	16
92	4	4	4	4	16
93	2	3	2	4	11
94	2	3	3	5	13
95	3	3	3	5	14
96	5	5	5	5	20
97	3	4	3	4	14
98	3	3	4	5	15
99	3	4	4	4	15
100	3	3	3	4	13
101	4	4	4	4	16
102	3	4	4	4	15
103	5	5	5	4	19
104	5	5	4	4	18
105	4	4	4	4	16
106	5	5	4	5	19
107	4	4	5	5	18
108	5	5	4	4	18
109	4	4	3	4	15
110	5	5	4	5	19
111	4	4	4	4	16
112	4	4	4	4	16

Responden	item1	item2	item3	item4	TotalItem
113	4	4	4	4	16
114	4	4	4	4	16
115	4	4	4	4	16
116	5	5	5	5	20
117	4	4	4	4	16
118	4	3	4	4	15
119	4	3	4	4	15
120	4	4	4	4	16
121	4	4	4	4	16
122	4	3	4	4	15
123	4	3	4	4	15
124	4	3	2	3	12
125	4	4	4	4	16
126	4	4	4	4	16
127	4	4	4	4	16
128	4	5	4	4	17
129	4	4	4	4	16
130	4	4	3	3	14



Lampiran 7: Jawaban Responden Berdasarkan Variabel Implementasi Kebijakan

Penyampaian Informasi Melalui Media Penyiaran (Y)

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	TotalItem
1	3	4	4	4	3	18
2	4	3	4	4	3	18
3	3	3	4	4	4	18
4	5	5	5	5	5	25
5	3	3	4	4	3	17
6	1	3	3	4	4	15
7	5	4	5	4	2	20
8	1	2	4	4	4	15
9	4	4	4	5	4	21
10	5	4	4	4	4	21
11	4	4	4	4	3	19
12	5	4	4	4	4	21
13	1	1	1	3	2	8
14	4	5	5	5	2	21
15	4	4	4	4	4	20
16	4	4	3	3	3	17
17	5	4	4	4	4	21
18	5	4	4	4	4	21
19	5	4	5	4	2	20
20	5	3	5	4	2	19
21	5	3	4	4	2	18
22	4	4	4	3	4	19
23	5	3	4	4	3	19
24	4	3	2	3	4	16
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20
31	2	2	3	3	3	13
32	3	3	3	4	4	17
33	4	4	3	5	3	19
34	1	2	1	4	1	9
35	5	4	5	4	5	23

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	TotalItem
36	3	4	4	4	3	18
37	4	4	3	4	5	20
38	5	3	2	2	3	15
39	4	4	4	3	3	18
40	3	3	4	2	2	14
41	4	1	1	1	1	8
42	4	3	2	3	3	15
43	3	3	3	3	4	16
44	1	2	3	2	3	11
45	3	3	4	4	3	17
46	4	4	3	3	3	17
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	5	4	3	20
49	4	4	5	4	4	21
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	5	4	4	4	4	21
54	3	3	4	3	3	16
55	4	3	4	3	3	17
56	4	4	4	3	3	18
57	4	3	3	3	4	17
58	4	3	4	3	4	18
59	4	5	4	3	3	19
60	4	3	2	3	3	15
61	3	4	4	4	4	19
62	4	4	4	4	3	19
63	3	3	5	4	3	18
64	4	3	3	3	4	17
65	4	4	4	4	3	19
66	2	4	4	2	3	15
67	3	3	4	3	4	17
68	4	4	4	4	5	21
69	4	3	2	3	2	14
70	4	4	4	4	4	20
71	3	3	3	3	3	15
72	4	4	2	3	2	15
73	4	4	4	4	4	20

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	TotalItem
74	4	4	3	4	5	20
75	4	4	4	4	4	20
76	4	4	4	4	3	19
77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20
79	4	3	4	3	4	18
80	5	5	5	5	5	25
81	4	4	4	4	4	20
82	4	4	4	4	4	20
83	2	2	3	2	4	13
84	3	2	3	3	5	16
85	4	3	3	3	5	18
86	5	5	5	5	5	25
87	4	3	4	3	4	18
88	5	3	3	4	5	20
89	4	3	4	4	4	19
90	3	3	3	3	4	16
91	4	4	4	4	4	20
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	5	25
94	3	3	3	3	3	15
95	4	4	4	4	4	20
96	4	4	4	4	4	20
97	4	4	1	1	4	14
98	3	3	3	3	3	15
99	5	5	5	5	5	25
100	4	4	3	3	4	18
101	4	4	3	3	4	18
102	4	4	4	4	4	20
103	4	4	3	3	4	18
104	4	4	4	4	4	20
105	4	4	4	4	4	20
106	4	4	4	4	4	20
107	3	3	2	2	3	13
108	4	4	4	4	4	20
109	4	4	4	4	4	20
110	4	4	4	4	4	20
111	3	4	4	4	4	19

Responden	item1	item2	item3	item4	item5	TotalItem
112	5	3	4	3	3	18
113	4	4	4	4	3	19
114	4	5	5	5	5	24
115	3	3	3	3	3	15
116	4	4	4	4	4	20
117	3	4	4	4	4	19
118	4	5	5	5	5	24
119	4	4	4	5	4	21
120	4	5	5	4	5	23
121	3	4	4	4	3	18
122	5	5	4	4	5	23
123	4	3	4	4	3	18
124	4	3	5	4	4	20
125	3	4	5	4	3	19
126	4	3	4	4	4	19
127	3	4	3	4	4	18
128	4	5	3	4	4	20
129	4	4	3	4	2	17
130	4	4	4	4	4	20

Lampiran 8: Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden

**JenisKelamin**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	67	51.5	51.5	51.5
	perempuan	63	48.5	48.5	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**Pendidikan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMU	2	1.5	1.5	1.5
	D3	42	32.3	32.3	33.8
	S1	79	60.8	60.8	94.6
	S2	7	5.4	5.4	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**Status**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menikah	64	49.2	49.2	49.2
	belum menikah	66	50.8	50.8	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

Lampiran 9: Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel

Komunikasi ( $X_1$ )

item1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	19	14.6	14.6	14.6
	kurang setuju	45	34.6	34.6	49.2
	setuju	43	33.1	33.1	82.3
	sangat setuju	23	17.7	17.7	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	33	25.4	25.4	25.4
	kurang setuju	45	34.6	34.6	60.0
	setuju	44	33.8	33.8	93.8
	sangat setuju	8	6.2	6.2	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	4	3.1	3.1	3.1
	tidak setuju	37	28.5	28.5	31.5
	kurang setuju	44	33.8	33.8	65.4
	setuju	39	30.0	30.0	95.4
	sangat setuju	6	4.6	4.6	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	4	3.1	3.1	3.1
	tidak setuju	27	20.8	20.8	23.8
	kurang setuju	52	40.0	40.0	63.8
	setuju	41	31.5	31.5	95.4
	sangat setuju	6	4.6	4.6	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**item5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	6	4.6	4.6	4.6
	tidak setuju	21	16.2	16.2	20.8
	kurang setuju	61	46.9	46.9	67.7
	setuju	34	26.2	26.2	93.8
	sangat setuju	8	6.2	6.2	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**item6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	6	4.6	4.6	4.6
	kurang setuju	30	23.1	23.1	27.7
	setuju	75	57.7	57.7	85.4
	sangat setuju	19	14.6	14.6	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.753	6

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	16.35	9.375	.445	.731
item2	16.68	8.841	.605	.685
item3	16.84	8.493	.629	.676
item4	16.75	9.137	.532	.706
item5	16.75	8.838	.583	.691
item6	16.06	11.562	.554	.789

Lampiran 10: Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel

Sumber Daya ( $X_2$ )

item1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	3	2.3	2.3	2.3
tidak setuju	8	6.2	6.2	8.5
kurang setuju	24	18.5	18.5	26.9
setuju	73	56.2	56.2	83.1
sangat setuju	22	16.9	16.9	100.0
Total	130	100.0	100.0	

item2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	2	1.5	1.5	1.5
tidak setuju	11	8.5	8.5	10.0
kurang setuju	31	23.8	23.8	33.8
setuju	67	51.5	51.5	85.4
sangat setuju	19	14.6	14.6	100.0
Total	130	100.0	100.0	

item3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sangat tidak setuju	5	3.8	3.8	3.8
tidak setuju	7	5.4	5.4	9.2
kurang setuju	33	25.4	25.4	34.6
setuju	71	54.6	54.6	89.2
sangat setuju	14	10.8	10.8	100.0
Total	130	100.0	100.0	



**item4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	2	1.5	1.5	1.5
	tidak setuju	17	13.1	13.1	14.6
	kurang setuju	28	21.5	21.5	36.2
	setuju	55	42.3	42.3	78.5
	sangat setuju	28	21.5	21.5	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	11.02	4.852	.703	.705
item2	11.12	5.033	.643	.734
item3	11.18	5.092	.611	.749
item4	11.12	5.049	.508	.806

Lampiran 11: Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel

Disposisi ( $X_3$ )

item1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	3	2.3	2.3	2.3
	tidak setuju	6	4.6	4.6	6.9
	kurang setuju	33	25.4	25.4	32.3
	setuju	62	47.7	47.7	80.0
	sangat setuju	26	20.0	20.0	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	3	2.3	2.3	2.3
	kurang setuju	24	18.5	18.5	20.8
	setuju	90	69.2	69.2	90.0
	sangat setuju	13	10.0	10.0	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	1	.8	.8	.8
	tidak setuju	5	3.8	3.8	4.6
	kurang setuju	33	25.4	25.4	30.0
	setuju	80	61.5	61.5	91.5
	sangat setuju	11	8.5	8.5	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	1	.8	.8	.8
	kurang setuju	21	16.2	16.2	16.9
	setuju	95	73.1	73.1	90.0
	sangat setuju	13	10.0	10.0	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**item5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat tidak setuju	2	1.5	1.5	1.5
	tidak setuju	4	3.1	3.1	4.6
	kurang setuju	26	20.0	20.0	24.6
	setuju	81	62.3	62.3	86.9
	sangat setuju	17	13.1	13.1	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**item6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	7	5.4	5.4	5.4
	kurang setuju	26	20.0	20.0	25.4
	setuju	80	61.5	61.5	86.9
	sangat setuju	17	13.1	13.1	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.819	6

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	19.17	6.266	.554	.805
item2	19.08	7.148	.638	.783
item3	19.22	6.717	.647	.777
item4	19.03	7.735	.515	.806
item5	19.13	6.440	.670	.771
item6	19.13	6.983	.542	.800

Lampiran 12: Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel

Struktur Birokrasi (X<sub>4</sub>)

item1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	3	2.3	2.3	2.3
	kurang setuju	20	15.4	15.4	17.7
	setuju	88	67.7	67.7	85.4
	sangat setuju	19	14.6	14.6	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	4	3.1	3.1	3.1
	kurang setuju	22	16.9	16.9	20.0
	setuju	81	62.3	62.3	82.3
	sangat setuju	23	17.7	17.7	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	4	3.1	3.1	3.1
	kurang setuju	32	24.6	24.6	27.7
	setuju	79	60.8	60.8	88.5
	sangat setuju	15	11.5	11.5	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

item4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	5	3.8	3.8	3.8
	kurang setuju	26	20.0	20.0	23.8
	setuju	79	60.8	60.8	84.6
	sangat setuju	20	15.4	15.4	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.748	4

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	11.63	2.514	.612	.654
item2	11.63	2.514	.524	.700
item3	11.77	2.349	.642	.633
item4	11.70	2.677	.412	.764

Lampiran 13: Distribusi Frekuensi Jawaban, Validitas dan Reliabilitas Variabel  
Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Melalui Media  
Penyiaran (Y)

**item1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat setuju	5	3.8	3.8	3.8
	setuju	3	2.3	2.3	6.2
	kurang setuju	24	18.5	18.5	24.6
	tidak setuju	78	60.0	60.0	84.6
	sangat tidak setuju	20	15.4	15.4	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**item2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat setuju	2	1.5	1.5	1.5
	setuju	6	4.6	4.6	6.2
	kurang setuju	38	29.2	29.2	35.4
	tidak setuju	72	55.4	55.4	90.8
	sangat tidak setuju	12	9.2	9.2	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**item3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat setuju	4	3.1	3.1	3.1
	setuju	7	5.4	5.4	8.5
	kurang setuju	27	20.8	20.8	29.2
	tidak setuju	74	56.9	56.9	86.2
	sangat tidak setuju	18	13.8	13.8	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**item4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat setuju	2	1.5	1.5	1.5
	setuju	6	4.6	4.6	6.2
	kurang setuju	33	25.4	25.4	31.5
	tidak setuju	78	60.0	60.0	91.5
	sangat tidak setuju	11	8.5	8.5	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**item5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat setuju	2	1.5	1.5	1.5
	setuju	10	7.7	7.7	9.2
	kurang setuju	36	27.7	27.7	36.9
	tidak setuju	66	50.8	50.8	87.7
	sangat tidak setuju	16	12.3	12.3	100.0
	Total	130	100.0	100.0	

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.791	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	14.73	6.477	.470	.784
item2	14.88	5.969	.721	.704
item3	14.81	5.846	.629	.731
item4	14.85	6.317	.632	.734
item5	14.89	6.670	.430	.796

## Lampiran 14: Regresi Linear Berganda

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, sumber daya <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.837 <sup>a</sup>	.725	.626	3.062	1.971

a. Predictors: (Constant), struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, sumber daya

b. Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.380	4	116.595	12.437	.000 <sup>a</sup>
	Residual	1171.928	125	9.375		
	Total	1198.308	129			

a. Predictors: (Constant), struktur birokrasi, komunikasi, disposisi, sumber daya

b. Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran

**Coefficients<sup>a</sup>**

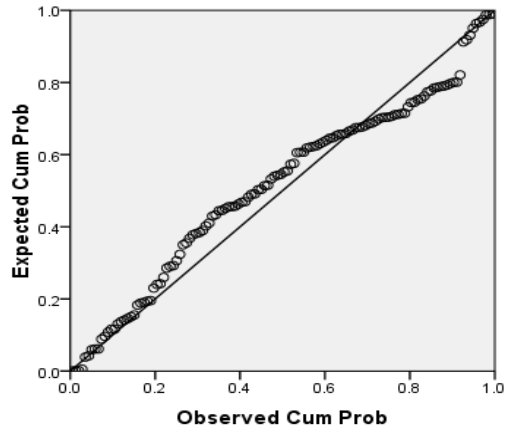
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.651	2.983		6.253	.000		
komunikasi	.077	.078	.091	7.992	.023	.927	1.078
sumber daya	.137	.098	.130	6.398	.003	.908	1.101
disposisi	.038	.089	.039	5.431	.018	.959	1.042
struktur birokrasi	.095	.137	.063	6.694	.001	.941	1.063

a. Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran



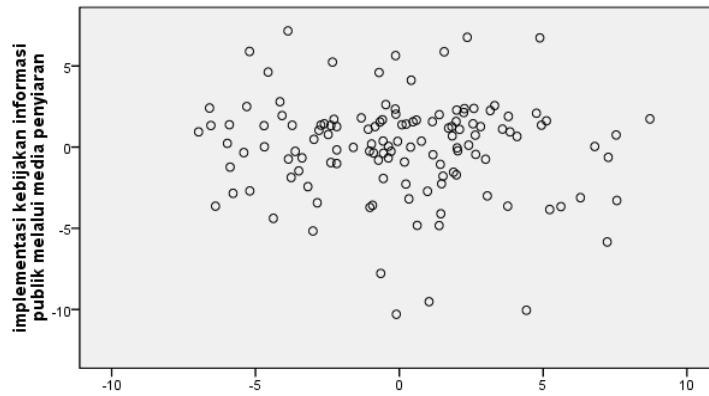
**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran**



**Partial Regression Plot**

**Dependent Variable: implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran**



**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		komunikasi	sumber daya	disposisi	struktur birokrasi	implementasi kebijakan informasi publik melalui media penyiaran
N		130	130	130	130	130
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	19.88	14.81	22.95	15.58	18.54
	Std. Deviation	3.586	2.888	3.093	2.030	3.048
Most Extreme Differences	Absolute	.072	.145	.183	.210	.162
	Positive	.072	.093	.168	.210	.162
	Negative	-.064	-.145	-.183	-.142	-.153
Kolmogorov-Smirnov Z		.818	1.650	2.085	2.392	1.846
Asymp. Sig. (2-tailed)		.514	.203	.347	.149	.219
a. Test distribution is Normal.						

Lampiran 15: Tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	130	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	1000000	384